

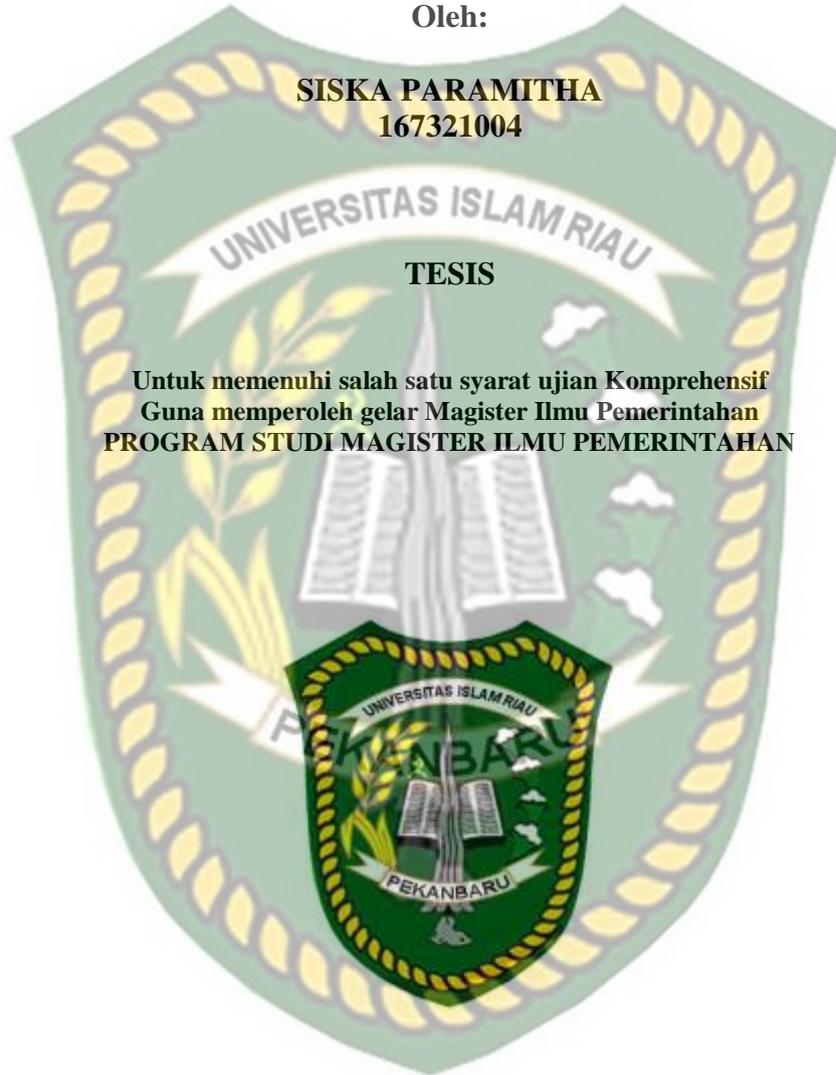
**TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
DI PROVINSI RIAU**

Oleh:

**SISKA PARAMITHA  
167321004**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI RIAU**

Oleh :

Nama : Siska Paramitha  
NPM : 167321004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.  
Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk di Ujikan.

Pembimbing I

Tanggal *12 JULI 2018.*

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Pembimbing II

Tanggal *05-12-2018*

  
Drs. H. Zaini Ali, M. Si

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Siska Paramitha  
NPM : 167321004  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : -  
Judul Tesis : **Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah  
Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau**

Telah di pertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jumat  
Tanggal : 8 Maret 2019  
Pukul : 08.30-09.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua**

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si**

**Sekretaris**

  
**Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M. Si**

**Anggota I**

  
**Indra Safri, S. Sos., M. Si**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**

  
**Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 011/UIR/KPTS/PS-IP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
    - a. Nama : Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Pembimbing I
    - b. Nama : Drs. H. Zaini Ali, M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SISKA PARAMITHA  
N P M : 167321004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : "TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI RIAU".

6. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  7. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  8. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  9. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 03 Februari 2018

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.  
NPK. 92 11 02 199



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
  2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
  4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
  5. Peringgal D:ASK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Paramitha  
NPM : 167321004  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Alamat :  
Judul Tesis : Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau

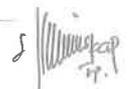
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyaaan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan tau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2018

Pelaku Pernyataan



  
Siska Paramitha

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Nomor : 177/E-UIR/27-PPS/2018  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Pekanbaru, 22 Januari 2018 M  
05 Jumadil Awal 1439 H

Kepada : Yth. **KETUA FK TAGANA PROVINSI RIAU**  
Di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa untuk menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, maka kepada mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis sebagai salah satu tugas akhir.

Sehubungan dengan itu datang menghadap Bapak, mahasiswa kami :

Nama : **SISKA PARAMITHA**  
Nomor Mahasiswa : **167321004**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Pemerintahan**  
Alamat : **Jl. Tanjung Datuk No. 254 Pekanbaru - Riau**

Bermaksud untuk memperoleh data dan informasi dari Lembaga yang Bapak pimpin guna menyelesaikan tesis dengan judul :

**"TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI RIAU".**

Hasil karya ilmiah tersebut semata - mata bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar, oleh karena itu besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.  
NPK. 92 11 02 199



## MARKAS KOMANDO FK TAGANA PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Kelurahan Simpang Empat  
Kecamatan Pekanbaru Kota, Riau 28116  
Telp. (0761) 29983

Pekanbaru, Juli 2018

Nomor : 26 /FK/VII /2018  
Lampiran : 1  
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
Cq. Ketua Prodi Magister Ilmu  
Pemerintahan  
Universitas Islam Riau  
di Pekanbaru

Berdasarkan Surat dari Direktur PPs Universitas Islam Riau Nomor : 177/E-UIR/27-PPS/2018 Tanggal 22 Januari 2018 perihal Izin Penelitian, atas nama :

Nama : SISKAPARAMITHA  
Nomor Mahasiswa : 167321004  
Program Studi / BKU : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau.

Pada prinsipnya kami dapat menerima menyetujui yang bersangkutan melaksanakan penelitian karya ilmiah pada Forum Koordinasi TAGANA Provinsi Riau. Sehubungan Data dan Informasi yang di dapat agar kiranya dapat menjadi bahan penelitian dan dipergunakan dengan semestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Forum Koordinasi Tagana  
Provinsi Riau,



H. RAHMAT PUTRA, S.HI, MH.



## MARKAS KOMANDO FK TAGANA PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Kelurahan Simpang Empat

Kecamatan Pekanbaru Kota, Riau 28116

Telp. (0761) 29983

Pekanbaru, Juli 2018

Nomor : 30/FK/VII/2018  
Lampiran :-  
Perihal : Penelitian Tesis

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
Cq. Ketua Prodi Magister Ilmu  
Pemerintahan  
Universitas Islam Riau  
di- Pekanbaru

Berdasarkan Surat dari Direktur PPs Universitas Islam Riau Nomor : 177/E-UIR/27-PPS/2018 Tanggal 22 Januari 2018 perihal Izin Penelitian, atas nama :

Nama : SISKI PARAMITHA  
Nomor Mahasiswa : 167321004  
Program Studi / BKU : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Forum Koordinasi TAGANA Provinsi Riau. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Forum Koordinasi Tagana  
Provinsi Riau,



H. RAHMAT PUTRA, S.HI, MH.

# TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK

Siska Paramitha  
167321004

Kata kunci : Tugas, Pembinaan, TAGANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Tugas Taruna Siaga Bencana membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau dan mengetahui faktor-faktor Penghambat yang mempengaruhi terlaksananya Peran Taruna Siaga Bencana membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey dengan olahan wawancara secara Kualitatif, sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat analisa survey yaitu menerangkan dan mengembangkan berbagai temuan penelitian dilapangan serta menganalisa wawancara yang diperoleh dari informan sehingga di peroleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, mengingat jumlah Informan yang tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber informasi dari informan. berdasarkan informan yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti merumuskan wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk narasi wawancara tersebut dianalisa secara kualitatif yang di deskriptifkan dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi dilapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain Tugas Taruna Siaga Bencana membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau dengan 4 indikator dari Santoso, 2010:291, Pemberian Petunjuk, Pemberian Pendidikan dan Latihan, Pemberian Bimbingan, serta Birokrasi berdasarkan rekap wawancara yang penulis analisa kembali dari obsevasi maka penulis menyimpulkan Peran Tagana dalam membantu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana maka dapat dikategorikan **Cukup Optimal** berarti Peran Taruna Siaga Bencana membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau berjalan dengan Cukup Berperan, meskipun masih ada beberapa yang menunjukkan Kurang Optimalnya tetapi masih bisa ditanggulangi.

**PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF DISASTER ASSISTANCE HELPING  
REGIONAL GOVERNMENT IN DISASTER MANAGEMENT  
IN RIAU PROVINCE**

**ABSTRACT**

**Siska Paramitha  
167321004**

*Keywords: Tasks, Coaching, TAGANA*

*This study aims to find out and explain how the task of Disaster Preparedness Midshipmen helps the Regional Government in Disaster Management in Riau Province and knows the inhibiting factors that affect the implementation of the Disaster Preparedness Cadets to assist Local Governments in Disaster Management in Riau Province. survey method with qualitative interviews, while in terms of the nature of this research is a survey analysis that is explaining and developing various research findings in the field and analyzing interviews obtained from informants so that an answer to the problem is formulated, considering the number of informants is not too much then researchers try to find sources of information from informants. based on informants described in the study the researchers formulated interviews with open nature and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze the data, in this case the collected data are grouped according to the type of each data and then presented in the form of interview narratives. Furthermore, the data that has been presented in the form of interview narratives is analyzed qualitatively which is described in the form of depictions that occur in the field, namely, from the results of the discussions that have been drawn, conclusions can be drawn from the Task Force for Disaster Preparedness to assist Local Governments in Disaster Management Riau Province with 4 indicators from Santoso, 2010: 291, Giving Guidance, Giving Education and Training, Giving Guidance, and Bureaucracy based on interview recap which the author analyzes back from observation, the author concludes the Role of Tagana in helping local government in this case disaster can be categorized as Good enough means that the Role of Disaster Preparedness Midshipmen helps Local Governments in Disaster Management in Riau Province run with enough role, although there are still some that show less optimal but can still be overcome.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **“TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI RIAU”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku rector Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan dalam penelitian ini
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan dalam penelitian ini.

4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pascasarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pascasarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Penulis

**Siska Paramitha**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	28
1.3 Batasan Masalah .....	29
1.4 Rumusan Masalah.....	29
1.5 Tujuan & Manfaat Penelitian.....	30
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1.1 Pemerintahan .....	31
2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	35
2.1.3 Azas Penyelenggaraan Pem.an yang baik .....	37
2.1.4 Teori dan Fungsi Pemerintahan.....	39
2.1.5 Teori Tugas & Fungsi.....	42
2.1.6 Teori Kebijakan Pemerintah.....	43
2.1.7 Teori Kepemimpinan Pemerintahan .....	45
2.1.8 Teori Manajemen.....	50
2.1.9 Konsep Pembinaan .....	55
2.2 Kerangka Pemikiran .....	59
2.2.1 Gambar Kerangka Pemikiran .....	60
2.3 Studi Terdahulu yang Relevan .....	60
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	63
3.1.1 Tipe Penelitian .....	63
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	63
3.1.3 Informan .....	64
3.1.4 Jenis dan Sumber Data .....	64
3.1.5 Teknik Pengumpulan Data .....	65
3.1.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	69
3.1.7 Teknik Analisa Data .....	71

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	73
4.2 Iklim dan Curah Hujan.....	74
4.3 Geomorfologi .....	75
4.4 Pemerintahan .....	75
4.5 Sosial Kependudukan.....	76
4.6 Sejarah Tagana .....	77
4.7 Pembahasan.....	100
1. Identitas Informan .....	100
2. Tingkat Pendidikan .....	100
3. Tingkat Usia Responden .....	102
4. Hasil Penelitian .....	103
A. Pra bencana.....	104
B. Bencana.....	110
C. Pasca Bencana.....	115
D. Struktur Birokrasi .....	120
4.8 Hambatan Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi .....	124
<b>BAB VI : KESIMPULAN &amp; SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan.....	126
6.2 Saran .....	127
6.3 Jadwal Penelitian .....	128
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 (empat) yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada pasal 2 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintah di negara Republik Indonesia, untuk mempermudahnya maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi

dalam daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksud daerah besar adalah pemerintahan provinsi sementara daerah kecil adalah pemerintahan kota dan Kabupaten, dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa susunan pemerintahan daerah terdiri dari provinsi dan dalam wilayah provinsi terdapat Kabupaten atau Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dari pada pelaksanaan pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu produktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntunan yang ada. Meningkatkan tuntunan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan Tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Fungsi pemerintahan menurut Ndraha untuk mencapai keberhasilan pemerintahan yaitu memproduksi alat-alat pemenuh kebutuhan manusia dan masyarakat (*civil* dan *public services*) yang bersifat objektif melalui pelayanan *imprartial* menuju kesebangsaan yang nyata. Birokrasi professional berjalur karier ( birokrasi sehat, biroideal ) merupakan alat yang kuat untuk mencapai hal tersebut. Birokrasi sehat bersifat mandiri, bebas dari tekanan partai politik atau kelompok kepentingan. Dengan birokrasi sehat, di satu pihak yang diperintah

sebagai pelanggan dan consumer semakin meningkat, sebaliknya sebagai korban dan mangsa semakin berkurang.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.<sup>2</sup> Selanjutnya Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.<sup>3</sup>

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, serta negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar menjadi syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan pilihan tersebut, Pemerintahan Daerah juga harus berasaskan pada 3 (tiga) organ penyelenggaraan pemerintahan yaitu **Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan**. Penerapan 3 organ Pemerintahan berdasarkan pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing satuan Pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daeraah, pemerintahan untuk mengadakan suatu program dan kegiatan masyarakat yang berada didaerah program tersebut tidaklah terlepas dari tujuan utama

<sup>1</sup> Ndraha, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 36

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1

<sup>3</sup> Ibid. ayat 2

diadakannya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada didaerahnya.

Berdasarkan Undang-undang Kementrian Sosial Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, bahwa dalam mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana diperlukan adanya Taruna Siaga Bencana. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka itulah sebab diperlukan peraturan menteri sosial tentang Taruna Siaga Bencana.

Adapun Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial :



**Gambar I. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial**

Sumber : <http://www.kemensos.go.id/sites/default/Permensos-Nomor-20-tahun2015-Lampiran>

Adapun Uraian Tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial yaitu sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

6. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Selanjutnya Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

b. Fungsi

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana, urusan hukum, dan hubungan masyarakat; dan
4. Urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pergudangan, dan tata usaha.

c. Uraian Tugas

1. Merumuskan rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi dan tata laksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pergudangan, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
6. Mengkoordinasikan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
8. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
9. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Selanjutnya Di Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 14 (empat belas sub bagian) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Subbagian Program dan Anggaran.
- 2) Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
- 3) Kepala Subbagian Pelaporan
- 4) Kepala Bagian Keuangan
- 5) Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan
- 6) Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji
- 7) Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
- 8) Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
- 9) Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
- 10) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
- 11) Kepala Subbagian Bagian Umum
- 12) Kepala Subbagian Kepegawaian
- 13) Kepala Subbagian Rumah Tangga
- 14) Kepala Subbagian Tata Usaha

Adapun selanjutnya susunannya yaitu sebagai berikut :

- Direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial
- Sekretariat direktorat jendral perlindungan dan jaminan sosial

- **Direktorat perlindungan sosial korban bencana alam**
- Direktorat jaminan sosial keluarga

Selanjutnya dari uraian diatas yang menjadi bagian dalam penelitian ini yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dimana uraian Tugasnya sebagai berikut :

#### Uraian Tugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

1. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam.
  - b. Fungsi
    - 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    - 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    - 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
  - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
  - 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- c. Uraian Tugas
- 1) Merumuskan sasaran kegiatan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
  - 2) Merumuskan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
  - 3) Melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
  - 4) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

- 5) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- 6) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- 7) Menyelenggarakan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- 8) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan Sumber Daya di bidang penanganan bencana alam.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan bidang penanganan Bencana Alam dengan unit/instansi terkait.
- 10) Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan Tugas direktorat perlindungan sosial korban bencana alam.
- 11) Menyampaikan laporan kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- 12) Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- 13) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sesuai dengan Tugas dan kewenangannya.

- 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan Tugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- 15) Melaporkan pelaksanaan Tugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam kepada atasan.
- 16) Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2. Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi**

### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan sosial korban bencana alam.

### **b. Fungsi**

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- 4) **penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan**

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

c. Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi.
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi.
- 3) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi.
- 4) Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi.
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi.
- 6) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi.
- 7) Melaksanakan koordinasi kegiatan Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi dengan Unit/Instansi terkait.
- 8) Membagi Tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi.
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi.

10) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi sesuai dengan Tugas dan kewenangannya.

11) Melaporkan hasil kegiatan Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi kepada atasan.

12) Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Kepala Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Korban Bencana Alam.

b. Fungsi

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penanganan Korban Bencana Alam;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Korban Bencana Alam;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penanganan Korban Bencana Alam;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penanganan Korban Bencana Alam; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Korban Bencana Alam.

c. Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam.
- 3) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam.
- 4) Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan korban bencana alam.
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan korban bencana alam.
- 6) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam.
- 7) Melaksanakan pembinaan Sumber Daya di bidang penanganan korban bencana alam.
- 8) Melaksanakan koordinasi kegiatan Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam dengan Unit/Instansi terkait.
- 9) Membagi Tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam.
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam.
- 11) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan di lingkungan Subdirektorat sesuai dengan Tugas dan kewenangannya.

- 12) Melaporkan hasil kegiatan Subdirektorat kepada atasan.
  - 13) Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Penguatan Sosial
  5. Kepala Subdirektorat Tata Kelola Logistik Bencana
  6. Sub Bagian Tata Usaha

Dari uraian diatas maka Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan salah satu Dinas yang membantu Tugas dari Kementerian sosial di Daerah. Berdasarkan struktur Dinas Sosial Provinsi Riau adapun yang menangani permasalahan Taruna Siaga Bencana terdapat pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ( Linjamsos ) khususnya pada seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ( PSKBA ).

Kemudian yang menjadi fokus dari penulis yaitu pada Tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dimana pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai beberapa uraian Tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- b. Membagi Tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan Tugas bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- d. Melaksanakan Siaga Tanggap Darurat Bencana Alam
- e. Menyiapkan dan mengevaluasi serta memberi bantuan korban bencana alam
- f. Melaksanakan kebijakan situasi norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perlindungan sosial Korban Bencana Alam dengan Unit/Instansi terkait

- h. Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikosial bagi korban bencana alam
- i. Melaksanakan pendataan sesuai Tugas di seksi perlindungan sosial korban bencana alam
- j. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana.**
- k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan verifikasi di seksi perlindungan sosial korban bencana alam
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Tugas dan kegiatan pada seksi perlindungan sosial korban bencana alam
- m. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai Tugas dan fungsinya.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas maka sangat diperlukan suatu pembinaan sebagaimana yang terdapat pada point j yaitu melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas taruna siaga bencana, adapun pentingnya pembinaan yaitu sebagai berikut :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan Tugas-Tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
  - b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
  - c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
  - d. Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
  - e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
  - f. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja.<sup>5</sup>
- Sehubungan dengan penugasan sebagian urusan tersebut maka kementerian

sosial bahwa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dalam Penanggulangan Bencana Diperlukan Adanya Taruna Siaga Bencana, untuk mewujudkan profesionalitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Taruna Siaga Bencana serta pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

<sup>5</sup> Nurcholis, 2005. *Pembinaan Organisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Alfabet, Hlm.133

Kemudian Dinas Sosial Provinsi juga mempunyai Tugas dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tata Tugas pembantuan yang diTugaskan kepada daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan Tugasnya juga menyelenggarakan Fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan bidang penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan Tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

TAGANA ditetapkan dengan maksud membantu Pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah untuk Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid Pasal 2 ayat 1-2

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.<sup>8</sup>

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>9</sup> Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya perlindungan sosial juga meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Tujuan Tagana ini dibentuk yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ruang lingkup peraturan ini mengatur mengenai Tugas dan fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pengendalian pemberdayaan dan penerahan Tagana, kewenangan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan.<sup>10</sup>

TAGANA mempunyai Tugas membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pascabencana serta Tugas-Tugas penanganan

---

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana pasal 1 ayat 1

<sup>9</sup> Ibid ayat 2

<sup>10</sup> Ibid

permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu TAGANA mempunyai fungsi pada saat :

a. Prabencana

- 1) Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
- 3) Pengurangan risiko bencana di lokasi bencana
- 4) Peningkatan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- 5) Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana
- 6) Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana
- 7) Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya
- 8) Pengurangan risiko dan kesiagaan lainnya.

b. Tanggap darurat

- 1) Kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan TIM Reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial
- 2) Identifikasi/pendataan korban bencana
- 3) Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman.
- 4) Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara

- 5) Operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum
- 6) Operasi tanggap darurat pada bidang logistik
- 7) Operasi tanggap darurat pada bidang psikososial
- 8) mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko
- 9) upaya tanggap darurat lainnya.

c. Pascabencana.

- 1) Identifikasi /pendataan kerugian material pada korban bencana
- 2) Identifikasi/ pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana
- 3) Penanganan bidang psikososial dan rujukan
- 4) Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait
- 5) Pendampingan dalam advokasi sosial.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, TAGANA berada dibawah kewenangan Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial, yang merujuk ke Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dimana TAGANA mempunyai hak :

- a) Mengikuti peningkatan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki

---

<sup>11</sup> Ibid pasal 6-

- b) Mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah melalui pemberian NIAT (Nomor Induk Anggota Tagana) yang diterbitkan Kementerian Sosial.
- c) Mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari pemerintah berkaitan dengan Tugasnya.
- d) Mendapatkan pemantapan dan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala oleh kementerian sosial pemerintah daerah serta mendapat sertifikat.

Selain hak diatas TAGANA juga mempunyai kewajiban :

- 1) Melaksanakan Tugas-Tugas pokoknya sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Melakukan komunikasi dan koordinasi antara anggota maupun dengan pihak terkait
- 3) Mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku
- 4) Memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana
- 5) Menjaga sikap dan nama baik TAGANA serta bertanggungjawab dalam Tugasnya.

Adapun jumlah tagana yang ada di Povinsi Riau berjumlah 838 orang yang terdata pada tahun 2016, dengan rincian 12 Kabupaten Kota, yaitu kuangsing dengan jumlah 39 orang, Inhu, 38 orang, Inhil 47 orang, Pelalawan 35 orang, Siak 35 orang, Kampar 95 orang, Rohul 39 orang, Bengkalis 40 orang, Rohil 38 orang, Meranti 25 orang dan Dumai 36 orang.

Sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut maka dari itu untuk mempermudah pelaksanaan peraturan maka

Pemerintah Provinsi Riau dengan persetujuan DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Tugas-tugas Daerah Provinsi Riau. Sebagai pendelegasian kewenangan maka Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai Badan daerah provinsi Riau dalam penanggulangan Bencana Alam.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan Tugas-Tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan kedudukan dan susunan organisasi dinas sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>12</sup> Dinas Sosial sebagai mana yang disebutkan diatas dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan Tugasnya, FK Taruna Siaga Bencana Alam Provinsi Riau mempunyai Tugas berdasarkan SK. Kepala Dinas Provinsi Riau No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor KPTS. 36/DINSOS/III/2016 Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (FK-TAGANA) Provinsi Riau.

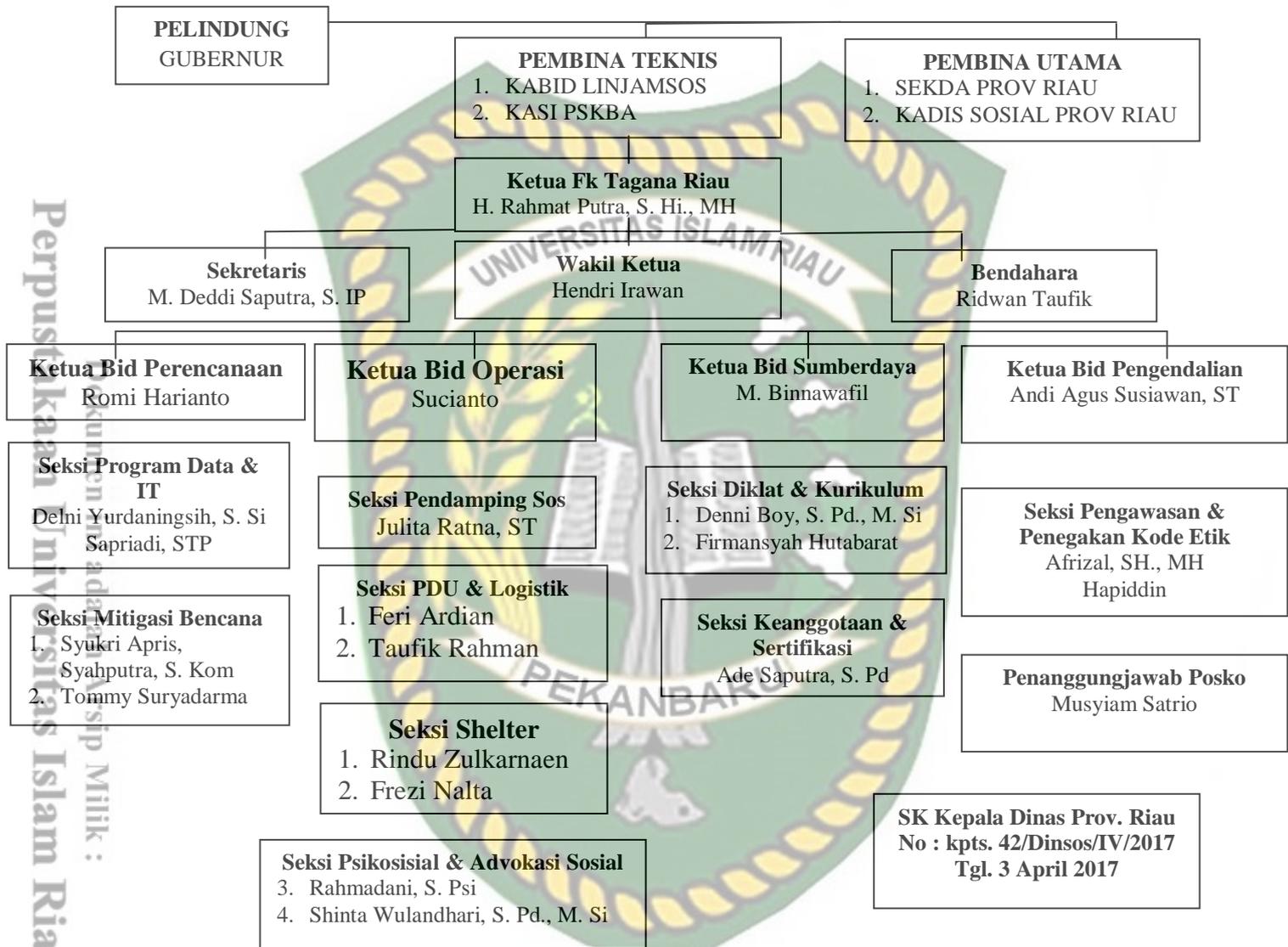
---

<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi Riau, Pasal 2 ayat 1

<sup>13</sup> Ibid ayat 2

Dalam melaksanakan Tugasnya, FK TAGANA Provinsi Riau mempunyai

Bagan Struktur sebagai berikut :



**Gambar I. 2 Struktur Pengurus FK TAGANA Provinsi Riau Periode 2017-2019**

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 penduduk Pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Nomor 460/Dinsos-BPJS/2018/180 tentang Penetapan Lokasi titik Pengungsian Di Desa Kelurahan sepanjang Aliran Sungai Kampar Tahun 2018, dijelaskan bahwa :

1. Dalam rangka upaya meningkatkan pengendalian dan penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Kampar secara terpadu, terarah dan terkoordinir baik di bidang logistik administrasi maupun pelaporan
2. Penanggulangan Bencana Alam Banjir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta memerlukan kemitraan masyarakat dan Dunia Usaha
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penanggulangan bencana alam banjir di perlukan pendekatan klaaster pengungsian dan perlindungan

Adapun data Bencana alam Banjir yang bisa penulis uraikan berdasarkan tabel berikut ini :

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten/Kota Provinsi Riau**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Nama Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/ Desa</b>	<b>Jenis Bencana</b>
1	Februari	Kampar	1. Bangkinang Kota 2. Bangkinang 3. Kampar 4. Kampar Utara	- Kel. Langgini - Desa Pulau Lawas - Simpang Kubu - Kampung Panjang	

1	2	3	4	5	6
			5. Rumbio Jaya	- Alam Panjang - Pulau Rumbai	
			6. Tambang	- Pulau Permai - Uar Sati - Tarantam	
		Rokan Hulu	1. Kepenuhan	- Kep. Timur	
			2. Bonai Darussalam	- Sontang	
			3. Kunto Darussalam	- Dusun Pelandak	
2	Maret	Bengkalis	1. Bengkalis	- Bengkalis	
		Indragiri Hulu	1. Kelayang	- Koto Medan - Palak Pisang	
			2. Lubuk Batu Jaya	- Kulim Jaya - Gelugur - Potonggan - Batu Sawar - Lubuk Sawah	
			3. Rengat Barat	- Berangan - Danau Baru	
			4. Rengat	- Pasir Kemilau	
		Pelalawan	1. Sekip Hilir	- Beringin - Tambak - Gondai	
			2. Pangkalan Kerinci	- pkl. Kerinci Kota - PKL Kerinci - Timur - Rantau Baru - Kuala Teranam - Makmur - Graha Pelabuhan	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

Dalam melaksanakan Tugas sebagai seksi perlindungan sosial korban bencana alam, maka penting pembinaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun gejala-gejala fenomena yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Belum adanya pembinaan berupa pelatihan, bimbingan dan pemberian buku pedoman yang dilakukan Dinas Sosial dalam meningkatkan kapasitas Taruna Siaga Bencana. Kurangnya kemampuan sebagian anggota Tagana melakukan Tugas-Tugasnya dilapangan.
2. Masih adanya sejumlah Tagana dalam Penanggulangan korban bencana alam yang belum bisa dikatakan baik karena ini juga dipicu masih lambatnya insentif (Tali Asih) yang disalurkan dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten-Kota Kepada Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Dimana dalam melaksanakan Tugas tersebut terkesan masing-masing lempar tanggung jawab.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya sebagian anggota Tagana belum mengetahui dengan Tupoksinya, anggota yang takut dilapangan ada yang kurang tau apa yang akan dia kerjakan.
2. Adanya lempar tanggungjawab antara satu sama lain bahwa kurang pahamnya sebagian anggota dengan tupoksinya.
3. Adanya kecenderungan sebagian anggota tagana belum optimal bekerja sehingga Tugas-Tugas yang di Tugaskan ada yang belum selesai tapi mereka sudah istirahat.

### 1.3 Batasan Masalah

Tulisan ini difokuskan pada Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau. Apakah sudah dijalankan mulai dengan prosedur dan faktor yang mempengaruhi Dimana Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 70 Tahun 2016 terdapat beberapa seksi kemudian dalam peningkatan Taruna Siaga Bencana Berdasarkan Bagan Organisasi terdapat 4 Bidang dan masing-masing bidang memiliki 3 seksi yang salah satu dari bidang itu adalah bidang perlindungan dan jaminan sosial dan yang menjadi fokus dari penulis yaitu pada Tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dalam dimana pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai beberapa uraian Tugas kemudian pada penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada Tugas yaitu Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana.

Selanjutnya batasan untuk penelitian ini peneliti membatasi pada tugas Tagana yang hanya membantu urusan social saja.

### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau ?
2. Apasaja Hambatan yang mempengaruhi Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau ?

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau.
- b. Untuk melihat hambatan-hambatan yang mempengaruhi terlaksananya Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau

**Manfaat :**

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Kedinasan Terutama Dinas Sosial Provinsi Riau.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pemerintahan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>1</sup>

Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat

---

<sup>1</sup> C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, halm. 31)

yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.<sup>3</sup>

Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>4</sup>

Menurut Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.<sup>5</sup>

Menurut ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.<sup>6</sup>

Gaffar mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.<sup>7</sup>

Menurut Budiarto mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan,

<sup>2</sup> Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

<sup>3</sup> Opcit. Hal. 16, Ndraha, 2011. Hal. 7

<sup>4</sup> Opcit. 8

<sup>5</sup> Opcit

<sup>6</sup> Opcit. Labobo. Hal. 2

<sup>7</sup> Opcit

berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.<sup>9</sup>

Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>10</sup>

Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut Tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan Tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seTugasgkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling

<sup>8</sup> Opcit. Gaffar

<sup>9</sup> Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

<sup>10</sup> Loc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011. Hal. 20

berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

- c. Ditinjau dari aspek Tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh Tugas dan kewenangan Negara.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan Tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal

<sup>11</sup> Loc. Cit. Hal. 168

<sup>12</sup> Op. Cit Ndraha, 79

yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

### 2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>13</sup>

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan Tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya

---

<sup>13</sup> Loc. Cit. Hlm.3

5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>14</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :
  1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan

<sup>14</sup> Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).<sup>15</sup>

b. Asas Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan Tugas-Tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan Tugas pembantuan ini adalah :

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Tugas-tugas Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

<sup>16</sup> *Ibid*, angka 9.

1. **Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Tertib Penyelenggara Negara**, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
5. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. **Efisiensi**, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>17</sup>

#### 2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan Tugas serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga

---

<sup>17</sup> Loc. Cit. Hlm.3

dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.<sup>18</sup>

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.<sup>19</sup>

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

---

<sup>18</sup> Op. Cit.75

<sup>19</sup> Op. Cit, 25

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini Tugas pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

### 2.1.5 Teori Tugas & Fungsi

Menurut Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

.Winardi (2003:34) Tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruanglingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Thoha (2011:76) Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasaindonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut Moenir (2010:18) Tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan , suatu Tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian rincian Tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

### 2.1.6 Konsep Kinerja Pemerintah

Keith Davis merumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah : kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.<sup>20</sup>

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan Tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>21</sup>

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja.<sup>22</sup> Selanjutnya Kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan Tugas-Tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>23</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu :

<sup>20</sup> William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama, hal. 228

<sup>21</sup> Mangkunegara, 2000 hlm. 7 . dalam Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefuulah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Kencana, hlm.223

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Hasibuan, Malayu. S. P.2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.34

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi

Pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Serta teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : massa (masyarakat) dalam menata dan menyelenggarakan proses pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut maka makna dari aktifitas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan desa ini sangat dibutuhkan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa, proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang disadari dan disengaja.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Brataha I. Nyoman, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.14

### 2.1.7 Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya.
2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimpinan (manager) adalah seorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama menjalankan dua hal secara efektif manajemen dan kepemimpinan.
3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan
4. Pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan kekuasaan formal dan tanggung jawab.<sup>25</sup>

Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen, kepemimpinan mempunyai Tugas menentukan kegagalan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan :

1. proses dimana seseorang atau sekelompok orang memainkan pengaruh atas orang lain, menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan;

<sup>25</sup> Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 119

2. kepemimpinan merupakan kemampuan positif mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan keunggulan organisasi untuk memberi inovasi nilai secara terus-menerus kepada pasar dan/pelanggan.
4. Kepemimpinan terdiri atas kepemimpinan diri (*self leadership*) kepemimpinan Tim (*TIM leadership*) dan kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*).<sup>26</sup>

Kepemimpinan mempunyai beberapa karakter yaitu :

1. Kepemimpinan Situasional ( *situational leadership* )
2. Kepemimpinan situasional (*situational leadership*)
3. Kepemimpinan karismatik (*charismatics leadership*)
4. Kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*)
5. Kepemimpinan transformasional ( *transformational leadership* )
6. Kepemimpinan Prilaku (*behavioural leadership*).<sup>27</sup>

Teknik kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan teknik pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan ditengah praktek kehidupan dalam organisasi tertentu, dan melingkupi konsep-konsep pemikirannya, prilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing, hlm.67

<sup>27</sup> Op. Cit, Dent, hlm.69

<sup>28</sup> Kartono, 2014. *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.3

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing atau tuntun, dari kata pimpin lahir kata memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau atau orang yang membimbing atau menuntun. Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan kepemimpinan.<sup>29</sup>

Kepemimpinan pemerintahan atau leader govermenace, adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil putusan secara cepat, tepat, dan terukur, serta memimpin tata pemerintahan yang baik dalam mengelolah sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.<sup>30</sup>

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (public service) dala layanan sipil (civil service).<sup>31</sup>

kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Pemimpin adalah yang ditunjuk dalam suatu kelompok, tim atau organisasi,
- 2) Pemimpin adalah sosok karismatik yang membuat keputusan yang baik dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama,

<sup>29</sup> Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.5

<sup>30</sup> Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, hlm.5

<sup>31</sup> Ndraha, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.226

- 3) kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain,
- 4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.<sup>32</sup>

Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang berhubungan satu sama lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat formal.<sup>33</sup>

*The activity of influencing people to cooperate toward some goal they to find desirable* adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.<sup>34</sup>

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada sistem nilai sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sisten formal merupakan bersumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai Tugas dan kewenangan serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk berTugas sesuai dengan status yang melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaanya. Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat sulit dipisahkan.

<sup>32</sup> O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta, hlm.41

<sup>33</sup> Op. Cit, Ndraha, hlm.39

<sup>34</sup> Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.9

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan suatu sarana bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya.<sup>35</sup> Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai perilaku kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga mengamati posisinya dan cara-caranya dalam menggunakan kekuasaannya.

Kepemimpinan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai “suatu proses dan kemampuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki seorang untuk menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan adalah kewenangan
2. Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif
3. Kepemimpinan adalah terhadap dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan masyarakat luas
4. Kewenangan proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau kelompok yang dipengaruhi dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara lebih efektif.<sup>36</sup>

Dalam tingkatan pemerintahan tertentu yang pimpinannya seharusnya menjalankan model kepemimpinan dua kaki yaitu mereka yang masuk ke dalam pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti kepala desa, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden serta pejabat publik yang diangkat tetapi Tugasnya langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu, pemimpin Satuan Kerja Tugasikat Daerah (SKPD) lainnya yang Tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kepala puskesmas,

<sup>35</sup> Loc. Cit, Thoah, hlm. 40

<sup>36</sup> Wasistiono, 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm. 22

Kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi sampai yang paling bawah berupa keputusan pejabat administratif tingkat bawah berdasarkan mandat dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan delegasi kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan.

### 2.1.8 Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.<sup>37</sup>

Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.<sup>38</sup>

Manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hlm. 17

<sup>38</sup> Ibid, Hlm. 18

<sup>39</sup> Ibid,

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor

atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan oleh pemimpin yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (*Human Relations*) terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

Inti terakhir dari keseluruhan proses administrasi adalah hubungan antar manusia. Pendapat tersebut dewasa ini tidak dapat atau sulit untuk disangkal lagi, mengingat seluruh proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksud untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Marihot Tua E.H, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki Tugas dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan Tugas manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari

Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya

organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

### 2.1.9 Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu.<sup>40</sup>

Pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut dikatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dengan mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menterjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah.

<sup>40</sup> Miftah Thoha, 2010, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm.207

3. Dengan mengadakan pertunjukan atau demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi . Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusus yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal.<sup>41</sup>

Menurut Nawawi pembinaan itu dilakukan dengan :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.
2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan,

<sup>41</sup> Ismail, Maimunah, 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur, Hlm. 167-168

pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain.

4. Memberikan kesempatan ikut berparatisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan fikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode gua dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya.<sup>42</sup>

Arti pentingnya pembinaan sbb:

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan Tugas-Tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d. Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
- f. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja.<sup>43</sup>

Pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lainnya :

<sup>42</sup> Nawawi, hadari, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm.111

<sup>43</sup> Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Alfabet, Hlm.133

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian Motivasi
- c. Pengembangan Karier
- d. Memberi Penghargaan.<sup>44</sup>

Selanjutnya pembinaan terdapat Tugas antara lain :

1. Pemberian Petunjuk
2. Pemberian Pendidikan dan Latihan
3. Pemberian Bimbingan.<sup>45</sup>

Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkat keahliannya, pengetahuannya atau sikap guna memperlancar Tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>46</sup>

Tujuan dari pembinaan itu adalah :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan Tugas-Tugas pemerinthan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu
- d. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada pancasila
- e. Diwujudkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja serasi

<sup>44</sup> Santoso, 2010. *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm.291

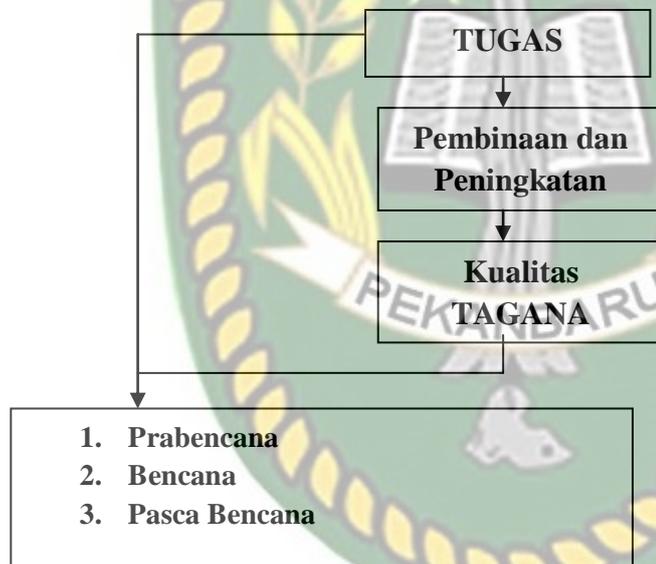
<sup>45</sup> Karyadi (Thoha , Miftah,1999) (dalam jurnal Rendra). *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta, Hlm.12

<sup>46</sup> Kusnadi, 2005. *Pengantar Manajemen*. Unibraw Press, Malang, Hlm.246

- f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur
- g. Diarahkan pada pembinaan system kerja.<sup>47</sup>

## 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek tentang Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan berdasarkan gambar berikut :



Sumber : Santoso, 2010 : 291

Gambar II. 1 Kerangka Pikir Tentang Tugas Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau

<sup>47</sup> Musanef, 1998. *System Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm.16

### 2.3 Studi Terdahulu yang Relevan

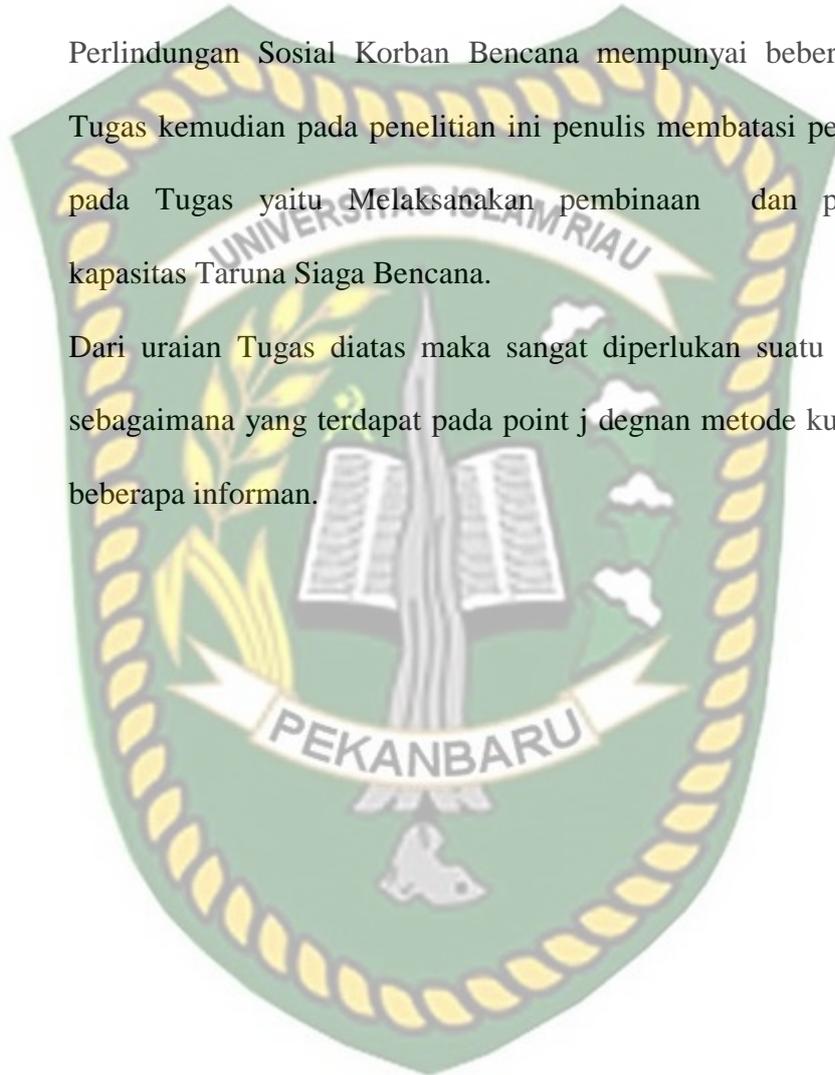
- A. Muhammad Zaini Ali, dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang uraian Tugas dan fungsi dinas daerah Kabupaten Siak di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penelitian ini memfokuskan dan ingin melihat Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pada Dinas Sosial Provinsi Riau, Zaini ingin melihat bagaimana kinerja pegawai negeri tersebut, dan ingin melihat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kinerja dinas sosial tersebut. Dengan menggunakan konsep Sedarmayanti (2004 :226), adapun fenomena-fenomena yang menjadi gejala pada penelitian Zaini yaitu, diperolehnya informasi bahwa pada tahun 2013 terdapat 8.358 kepala keluarga (KK) Komunitas adat terpencil yang belum diberdayakan, kemudian masih banyaknya dijumpai pengemis, gelandang maupun pengamen yang berkeliaran disekitar lampu merah lalu lintas Pekanbaru. Yang menandakan masih lemahnya kinerja Dinas sosial kota pekanbaru provinsi riau, dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
- B. Eva Ismail dengan judul, Analisis Kinerja Pegawai Negeri sipil pada dinas sosial Provinsi Riau, adapun fenomena yang terlampir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : musibah banjir yang terjadi dikecamatan Tualang Pada minggu pertama bulan november 2010 kepala keluarga yang kena musibah dan minggu pertama bulan desember juga dalam jumlah yang sama yaitu 91 kepala keluarga,

kedua gejala fenomena tersebut yaitu musibah banjir yang terjadi di kecamatan sungai apit pada minggu kedua bulan november 2010 kepala keluarga yang terkena musibah banjir 27 kepala keluarga, dalam penanggulangan bencana seperti yang terjadi musibah banjir, angin puting beliung dan kebakaran rumah masarakat, fakta nya yang terjadi didinas sosial dan tenaga kerja belum memiliki anggota taruna siaga bencana (TAGANA), pada penelitian ini Eva ingin melihat bagaimana pelaksanaan dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten siak dalam mengendalikan penyandang masalah sosial dan menanggulangi bencana dikabupaten siak. Serta ingin melihat upaya-upaya apasaja yang harus ditempuh untuk meningkatkan kinerja dinas sosial tersebut. Dengan indikator nya yaitu melihat dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dengan tipe penelitian survey metode kuantitaif.

- C. Siska Paramitha dengan Judul Implementasi peraturan menteri sosial nomor 29 tahun 2012 tentang taruna siaga bencana (studi dinas sosial provinsi riau), dimana terdapat persamaan yaitu pada Dinas yaitu Dinas sosial namun objek yang dikaji berbeda baik dengan Muhammad Zaili Ali, maupun dengan Eva pada penelitian ini ingin melihat pada Dimana Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 terdapat beberapa seksi kemudian dalam peningkatan Taruna Siaga Bencana Berdasarkan Bagan Organisasi terdapat 4 Bidang dan masing-masing bidang memiliki 3 seksi yang salah satu

dari bidang itu adalah bidang perlindungan dan jaminan sosial dan yang menjadi fokus dari penulis yaitu pada Tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dalam dimana pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai beberapa uraian Tugas kemudian pada penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada Tugas yaitu Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana.

Dari uraian Tugas diatas maka sangat diperlukan suatu pembinaan sebagaimana yang terdapat pada point j degnan metode kualitatif dan beberapa informan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah survey, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada analisis pelayanan publik. Survey dibatasi pada penelitian yang ketentuan kebenarannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan dengan Lokasi penelitian dilaksanakan di Di Dinas Sosial Provinsi Riau. Pemilihan intansi ini adalah dengan pertimbangan bahwa kantor tersebut adalah salah satu instansi yang cukup penting dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas taruna iaga bencana.

### 3.1.3 Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Drs. H. Dahrius Husin, MM selaku Kepala dinas Sosial Propinsi Riau
2. Drs. Umar, HM Selaku Kabid Linjamsos
3. Fety Nurhidayati, S. Psi selaku Kasi PSKBA
4. Tri Agus, SE., M. Si selaku Staf Seksi PSKBA
5. Hendri Irawan selaku Anggota Tagana
6. Ade Hermawan, S.Ag selaku Anggota Tagana
7. Andi Rahmat selaku Tokoh Masyarakat.
8. Dedesweni selaku Tokoh Masyarakat
9. Fenty Rahmadhani Tokoh Masyarakat

### 3.1.4 Jenis dan Sumber data

Untuk memperoleh data informasi yang di perlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut;

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media Tugas tara). Data primer dapat dapat berupa subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil obsevasi terhadap susatu benda (fisik),kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yang telah diolah berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum, struktur, organisasi, jumlah pegawai serta Tugas -Tugas nya, dan data yang didapatkan diolah oleh penelitian.

Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi dan perusahaan, (Indonesian Costumer SatisfaktionIndex) yang dipublikasikan oleh majalah Swa No.18 (18 Sep 2002).<sup>1</sup>

### 3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal, introfektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatanvisual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematic kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan data yang bereneka ragam tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Antar metode satu dengan yang lainnya tidak terpisah, tetapi

<sup>1</sup> Ruslan, 2013. *Http :// seputar pengertian data..com, sabtu, 29 Juli 2017, 20.30 wib.* Hlm.29-30

saling berkaitan dan saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Data yang diperoleh dari suatu metode disilangkan dengan data yang diperoleh dari melalui metode yang lain sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan.

Untuk menjalankan tuntutan metode yang demikian, penelitian kualitatif menampakan manusia sebagai figure terpenting dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menampakan kuesioner, rumusan matematika, dan statistic sebagai instrument pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian kualitatif memosisikan manusia sebagai instrument sebagai penelitian. Peneliti sebagai manusia berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Oleh karena itu, realita yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif sering dianggap bersifat subjektif karena sangat tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak yang terkait, baik peneliti maupun informan yang terlibat di dalamnya. Untuk menghindari temuan yang subjektif, penelitian kualitatif menggunakan bermacam sumber data.

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke dalam dua katogori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif.<sup>2</sup> Tenik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berTugas serta, sedangkan noninteraktif meliputi pengamatan tak berTugas serta, analisis isi dokumen, dan arsip. Sumber data penelitian kualitatif adalah manusia dengan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen. perbedaan mendasar penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah

---

<sup>2</sup> Mantja, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.52

bagaimana informasi (data) dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah perilaku yang nyata berupa penglihatan, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh karena itu peneliti merupakan instrumen kunci langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

Prinsip dalam pengumpulan data penelitian kualitatif ialah: (1) menggunakan multisumber bukti, menggunakan banyak informan dan memerhatikan sumber-sumber bukti lainnya; (2) menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengkoordinasikan data yang telah dikumpulkan, biasanya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data, supaya data yang dikumpulkan tidak hilang saat dibutuhkan nanti; dan (3) memelihara rangkaian bukti, tujuan agar bisa ditelusuri dari butir-butik yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan, penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.<sup>3</sup>

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh pancaindera, secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dll.

<sup>3</sup> Gunawan, 2016. *Penelitian Kualitatif*, Hlm141-142

Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Pengertian observasi yang lebih sempit ini adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian atau memenuhi syarat untuk di gunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.<sup>4</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dalam definisi lain Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antar pewawancara dan terwawancara. Dan dapat disimpulkan bahwa Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

<sup>4</sup> James & Dean, 1992. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Hlm.286)

### 3. Dokumentasi

Dokumen yaitu data yang diperlukan melalui dokumen-dokumen yang didapat dilapangan yang ada dan dimiliki hubungan dengan penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data memanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.<sup>5</sup>

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masalah yang ditulis atau di cetak, dapat berupa catatan anekdot surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal. Komunikasi bagi publik yang beragram, file siswa dan pegawai, deskripsi, program dan data statistik pengajaran. Penelitian terhadap teknik-teknik ini, baru dapat dilakukan manakala peneliti telah berada dilapangan. Penjelasan mengenai teknik-teknik pengumpulan data ini dapat dilihat pada pembicaraan data dan metode pengumpulan data.

#### E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan yang dilakukan dalam penelitian bertujuan agar hasil sesuatu penelitian dapat ditanggung jawab dari segala segi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang relevan di dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan pada saat pengumpulan data, dengan adanya perpanjangan keikutsertaan dari yang diperoleh

<sup>5</sup> Moleong, 2012:217. *Http:// seputar penelitian kuantitatif kualitatif*, 29 juli 2017, 21: 40 Wib

dikumpulkan dapat dipilih kembali dari gangguan atau penyimpangan yang terdapat dalam penelitian ini. Karena dengan perpanjangan keikutsertaan dapat menguji ketidakabsahan data informasi yang dikenal oleh disteri, baik berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek.<sup>6</sup>

## 2. Triangulasi

Menurut (Moleong,2012:330) menyatakan bahwa triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang mendapatkan suatu yang lain, Moleong menjelaskan dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah.
- d. Membandingkan hasil wawancara isu suatu dokumen yang berkat.

---

<sup>6</sup> Ibid

### G. Teknik Analisis Data

Penelitian Tugas Taruna Siaga Bencana membantu Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau ini menggunakan metode kualitatif di dalam pencarian data. Penelitian kualitatif sifat deskriptif, data yang di peroleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan, disusun penulisan dilokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif berjalan melalui peroses sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya teteap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi, yang dilengkapi dengan analisis dokumen. Adapun setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis

dengan deskriptif yaitu analisis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dipadukan dengan teori-teori yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Kondisi Gerografis Kota Pekanbaru

Secara geografis, posisi Kota Pekanbaru terletak  $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$  bujur timur dan  $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$  lintang utara, keadaanya relatif merupakan daerah dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam.

Luas kota Pekanbaru saat ini  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ , Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang membentang dari barat ke timur, yang juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat.

Batas-batas daerah Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten siak dan kabupaten Kampar
- 2) Sebelah selatan: Kabupaten kampar dan kabupaten pelalawan
- 3) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

➤ wilayah adminitrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan :12 kec

Kelurahan :78 kel

Jumlah RW :609 RW

Jumlah RT :2.589 RT

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk
1.	Tampan	4.872 Km <sup>2</sup>	175.634 Jiwa
2.	Payung Sekaki	51.36 Km <sup>2</sup>	106.000 Jiwa
3.	Bukit Raya	22,05 Km <sup>2</sup>	106.161 Jiwa
4.	Marpoyan Damai	29,74 Km <sup>2</sup>	116.536 Jiwa
5.	Tenayan Raya	171,27 Km <sup>2</sup>	142.519 Jiwa
6.	Limapuluh	4,04 Km <sup>2</sup>	43.982 Jiwa
7.	Sail	3,26 Km <sup>2</sup>	22.956 Jiwa
8.	Pekanbaru Kota	2,26 Km <sup>2</sup>	27.059 Jiwa
9.	Sukajadi	3,76 Jiwa	49.336 Jiwa
10.	Senapelan	6,65 Jiwa	38.183 Jiwa
11.	Rumbai	128,85 Jiwa	73.231 Jiwa
12.	Rumbai Pesisir	157,33 Jiwa	72.970 Jiwa
	Total	632,26 Jiwa	1.011,467 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017

#### 4.2 Iklim dan Curah Hujan

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 21,0<sup>0</sup>C 34,7<sup>0</sup>C, secara umum kondisi iklim di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam data berikut ini :

- Suhu minimum : 19,2<sup>0</sup> C-22,0<sup>0</sup> C
- Suhu maksimum : 32,6<sup>0</sup> C-36,5<sup>0</sup> C
- Curah hujan : 62,6-407,8 mm/tahun
- Musim : Hujan dan Kemarau
- Kelembaban minimum : 41%-59%
- Kelembaban maksimum : 98%-100%

Daerah yang paling sering ditimpa hujan di setiap tahun adalah Indragiri Hulu dan Pekanbaru yaitu 203 hari, Kota Dumai 161 hari, Kabupaten Pelalawan 155 hari, serta Kabupaten Siak 73 hari.

#### 4.3 Geomorfologi

Kota Pekanbaru keadaanya relatif merupakan daerah datar dengan :

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir
- Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

#### 4.4 Pemerintahan

Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 september, daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±446,50 Km<sup>2</sup> dengan 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan, dari pengukuran lapangan oleh BPN Provinsi Riau maka ditetapkan

luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>, dengan Perda No.3 tahun 2003 kemudian wilayah Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan, dengan Perda No.4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat.

#### **4.5 Sosial Kependudukan**

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk menurut hasil registrasi tahun 2006 sebanyak 754.467 jiwa dan tahun 2007 sebanyak 779.900 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 25,433 jiwa, apabila dibandingkan pada tahun 2005 dengan tahun 2006 dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 14,302 jiwa setiap Km<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 375 jiwa setiap Km<sup>2</sup>.

#### 4.6 Sejarah Terbentuknya Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sebagai Organisasi Penanggulangan Bencana

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan bencana, baik bencana karena peristiwa alam seperti gempa bumi dan tsunami atau gelombang dahsyat, letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan musim kering panjang, karena perilaku manusia/industri/teknologi seperti kebakaran hutan/lahan/permukiman, kontaminasi lingkungan hidup, kebocoran bahan beracun dan berbahaya dan akhir-akhir ini kerusuhan sosial. Tidak jarang bencana-bencana yang terjadi diakibatkan oleh perpaduan peristiwa alam dan perilaku manusia, seperti kebakaran hutan karena pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan perkebunan dan hutan tanaman industri bersamaan dengan berlangsungnya gejala alam El Nino, banjir yang bersamaan dengan gejala alam La Nina. Kemungkinan terjadinya bencana industri yang dipicu oleh gejala alam seperti yang dapat terjadi di kawasan Selat Sunda sangat dikhawatirkan.

TAGANA sebagai organisasi sosial kepemudaan, pada hakekatnya sebagai organisasi telah memenuhi empat syarat organisasi, yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya nilai yang menghimpun orang tersebut, adanya tujuan bersama dan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembentukan TAGANA merupakan suatu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan generasi muda dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, khususnya yang berbasis masyarakat. Keberadaan TAGANA akan menempatkannya sebagai organisasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, keanggotanya telah dilatih menjadi bagian dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya, berkemampuan

melaksanakan aneka peranan di bidang penanggulangan bencana secara profesional. Sebagai suatu organisasi, TAGANA mampu mengembangkan program dan kegiatannya secara berlanjut.

TAGANA sebagai organisasi pelayanan sosial atau organisasi pelayanan manusia mempunyai serangkaian karakteristik Tujuan organisasi ini adalah untuk memproses serta merubah manusia sebagai alat untuk mencapai hasil akhir yang bersifat sosial. Selanjutnya yang menjadi sasaran sekaligus juga sebagai masukan dan keluaran utama organisasi ini adalah manusia. Mengingat tujuannya yang beraneka ragam, maka organisasi pelayanan sosial kerap kali harus menentukan prioritas diantara tujuan-tujuan ini, yang diantaranya dapat saling kontradiksi, misalnya pencegahan, pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi.

Organisasi ini banyak sekali menangani peristiwa-peristiwa yang sifatnya non-rutin, terutama karena sasaran yang dihadapinya merupakan sasaran sosial yang reaktif dengan perilaku yang kadangkala sulit diprakirakan sehingga mempersulit pengendalian dan pencapaian tujuan. Situasi khas organisasi ini adalah situasi pemecahan masalah yang berkesinambungan sehingga menuntut persyaratan prestasi yang tinggi dari personal organisasi.

Bencana diartikan secara beraneka ragam, baik yang sifatnya umum maupun yang diwarnai oleh kepentingan organisasi. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditemukan karakteristik bencana sebagai berikut:

1. Adanya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal. Kerusakan ini biasanya cukup parah, kadangkala mendadak, tidak diduga dan luas jangkauannya.

2. Merugikan manusia, baik yang berupa kematian, hilang, luka, kecacatan, kesengsaraan maupun akibat negatif pada kesehatan.
3. Terjadinya gangguan sistem pemerintahan, komunikasi, transportasi dan berbagai pelayanan umum lainnya, terutama air minum, listrik dan telepon.
4. Munculnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal/ penampungan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan dan pelayanan sosial.

Penanggulangan bencana adalah suatu proses dinamis, terencana, terorganisasi, dan berlanjut untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pengamatan dan analisis bahaya serta pencegahan, mitigasi (pelunakan atau peredaman dampak bencana), kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum, tujuan penanggulangan bencana adalah:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban.
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk

mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.

5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Tujuan pembentukan TAGANA adalah tersedianya Organisasi, mekanisme, unit, atau satuan penanggulangan bencana di lingkungan masyarakat yang terlatih memadai, selalu siaga dan mampu mendukung semua aspek penanggulangan bencana, wahana partisipasi, pemberdayaan, dan kemitraan generasi muda di bidang penanggulangan bencana. Wahana partisipasi, pemberdayaan, dan kemitraan generasi muda di bidang penanggulangan bencana.

Tujuan kegiatan TAGANA adalah:

1. Membantu masyarakat agar memahami tentang kemampuan diri dan kondisi lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana;
2. Membantu masyarakat agar menyadari bahwa keberadaan peristiwa di lingkungannya yang dapat menimbulkan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan tersebut maupun dari kehidupan dan penghidupannya sehingga menumbuhkan sikap menerima dan memahami kenyataan ini;
3. Membantu masyarakat agar merasa memiliki lingkungannya karena telah memberinya tempat hunian, betapapun kurang dan terbatasnya lingkungan tersebut;

4. Mengambil langkah-langkah bersama untuk secara bertahap dan berlanjut meningkatkan kemampuan berusaha dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan warga masyarakat maupun menunjang upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi peristiwa yang dapat menimbulkan bencana;
5. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan potensi, sumber dan kondisi lingkungan hidup setempat dan untuk menumbuhkembangkan pemahaman tentang jenis-jenis bahaya, baseman dan siklusnya yang dapat menimbulkan bencana sebagai akibat peristiwa alam atau perilaku manusia;
6. Membantu pelaksanaan pelatihan secara bertahap dan berlanjut, disertai geladi, tentang aspek-aspek penanggulangan bencana, terutama pencegahan, mitigasi atau pelunakan dampak bencana, kesiapsiagaan dan peringatan dini, sesuai dengan tingkat dan jenis kerawanan bencana setempat.
7. Membantu masyarakat agar menyadari perlunya dukungan bantuan dari luar untuk meningkatkan kemampuan guna mengatasi berbagai keterbatasan diri maupun lingkungan serta berperan aktif dalam pendayagunaan bantuan dari luar tersebut.

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan kegiatan TAGANA adalah:

1. Prinsip nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan landasan organisasi dan kegiatannya.

2. Prinsip kebutuhan masyarakat dan sasaran. Kebutuhan masyarakat dan sasaran di dalamnya selalu menjadi dasar keberadaan organisasi dan penyediaan kegiatannya.
3. Prinsip totalitas organisasi. Organisasi harus dipahami secara utuh, sebagai instrumen hidup yang terdiri dari aneka unsur yang saling berhubungan.
4. Prinsip tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus disusun, diungkapkan, dipahami, dan digunakan secara jelas.
5. Prinsip komunikasi. Jalur komunikasi terbuka sangat penting guna berfungsinya organisasi secara sempurna.
6. Prinsip pengorganisasian. Pekerjaan orang banyak harus diatur secara terorganisasi dan harus distrukturkan sehingga tanggung jawab dan hubungan dapat dipahami secara jelas.
7. Prinsip perencanaan. Proses perencanaan berlanjut sangat penting guna pengembangan kegiatan organisasi yang bermanfaat.
8. Prinsip kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus memegang tanggung jawab utama guna kepemimpinan organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan penyediaan kegiatan profesional.
9. Prinsip tanggung jawab profesional. Pengurus organisasi bertanggung jawab dalam penyediaan kegiatan profesional yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar praktik profesional.

10. Prinsip hubungan yang bertujuan. Hubungan kerja yang bertujuan dan efektif harus diciptakan antara semua unsur internal organisasi dan pihak eksternal terkait.
11. Prinsip partisipasi. Sumbangan yang tepat dari Pengurus, staf dan sasaran selalu diupayakan dan digunakan melalui proses partisipasi dinamis dan berkesinambungan.
12. Prinsip pendelegasian. Pendelegasian tanggung jawab dan wewenang kepada tenaga profesional sangat penting.
13. Prinsip koordinasi. Pekerjaan yang didelegasikan kepada orang banyak harus dikoordinasi secara tepat sehingga sumbangan-sumbangan spesifik dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dan seluruh energi dapat difokuskan secara tepat pada pencapaian misi.
14. Prinsip penggunaan sumber. Sumber berupa uang, fasilitas, dan personel harus dipelihara, dilestarikan, dan digunakan dengan hati-hati sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada organisasi.
15. Prinsip perubahan. Proses perubahan berlangsung terus-menerus, baik di dalam masyarakat maupun organisasi.

Fungsi TAGANA terdiri dari :

1. Fungsi Pencegahan, yaitu menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah atau kebutuhan yang dialami oleh korban dan lingkungan sosialnya.

2. Fungsi Pengembangan atau Pemberdayaan, yaitu menumbuh-kembangkan kemampuan, motivasi, serta peranan korban dan lingkungan sosialnya.
3. Fungsi Rehabilitasi, yaitu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan serta memulihkan dan meningkatkan status dan peranan sosial korban dan lingkungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Fungsi Perlindungan, yaitu menjamin setiap warga negara agar terhindar dari aneka peristiwa bencana yang menyebabkannya. mengalami berbagai permasalahan.
5. Fungsi Penunjang, yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan bencana sektor bidang terkait lain.

Beberapa peranan umum TAGANA yang saling berkaitan, menunjang dan melengkapi dalam penanggulangan bencana tercakup dalam berbagai bidang sebagai berikut :

- a. Informasi, yaitu menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- b. Partisipasi, yaitu mengambil langkah-langkah aktif-proaktif dalam penyediaan sumber yang dibutuhkan oleh korban serta pengembangan pendekatan penanggulangan dan peningkatan kesejahteraan korban.

- c. Pemberdayaan, yaitu meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi dan kemampuan semua pihak yang terkait dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.
- d. Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan berupa sumber dan peluang bagi organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
- e. Asistensi, yaitu menyediakan bantuan, baik material maupun konsultasi, bagi organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
- f. Mediasi, yaitu menyalurkan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan antar organisasi atau lembaga penanggulangan bencana maupun antara pihak yang membutuhkan dengan pihak pemilik sumber, sehingga tercipta suatu sistem penanggulangan bencana terpadu yang menguntungkan kepentingan terbaik korban.
- g. Kemitraan, yaitu menjalin hubungan dengan pemilik sumber serta menyalurkan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi atau lembaga penanggulangan bencana dengan pemilik sumber.
- h. Mobilisasi, yaitu menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber guna peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.

- i. **Negosiasi**, yaitu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja penanggulangan bencana untuk memperoleh berbagai dukungan yang diperlukan.

Beberapa peranan TAGANA dalam siklus penanggulangan bencana adalah :

1. **Kesiapsiagaan**
  - a. **Penyusunan dan pemeliharaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang valid dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.**
  - b. **Penyiapan tindakan-tindakan darurat, seperti evakuasi penduduk ke tempat aman, penyimpanan bahan, dsb.**
  - c. **Penyediaan dan penggunaan sistem-sistem peringatan bahaya.**
  - d. **Komunikasi darurat.**
  - e. **Penyuluhan penyadaran masyarakat.**
  - f. **Program-program pendidikan dan pelatihan, termasuk latihan, geladi, simulasi, dsb.**
  - g. **Pengumpulan dan pengkajian data dan informasi yang berkaitan dengan kejadian bencana di masa lalu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta kondisi kerawanan lingkungan permukiman terhadap berbagai jenis bencana guna penentuan kebutuhan pemberdayaan sasaran.**

## 2. Pencegahan

Pelibatan diri dalam pembangunan dam untuk mencegah banjir atau waduk untuk mencegah kekeringan, pembuatan peraturan perundang-undangan/peraturan daerah tentang tata guna tanah, pembangunan infrastruktur jauh dari daerah rawan bencana, dsb.

## 3. Mitigasi

- a. Membantu pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan penanggulangan bencana.
- b. Ikut serta/melibatkan diri dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan (seminar, lokakarya, studi banding, dll.)
- c. Kampanye/penyuluhan sosial
- d. Penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan bencana
- e. Pengembangan sistem-sistem peringatan bahaya bencana.
- f. Mendorong pembangunan gedung/rumah tahan gempa, angin puting beliung, dll.

Peringatan Dini Pendayagunaan informasi kritis atau sangat dibutuhkan guna penanggulangan keadaan darurat. Informasi ini merupakan petunjuk awal akan kemungkinan terjadinya keadaan darurat.

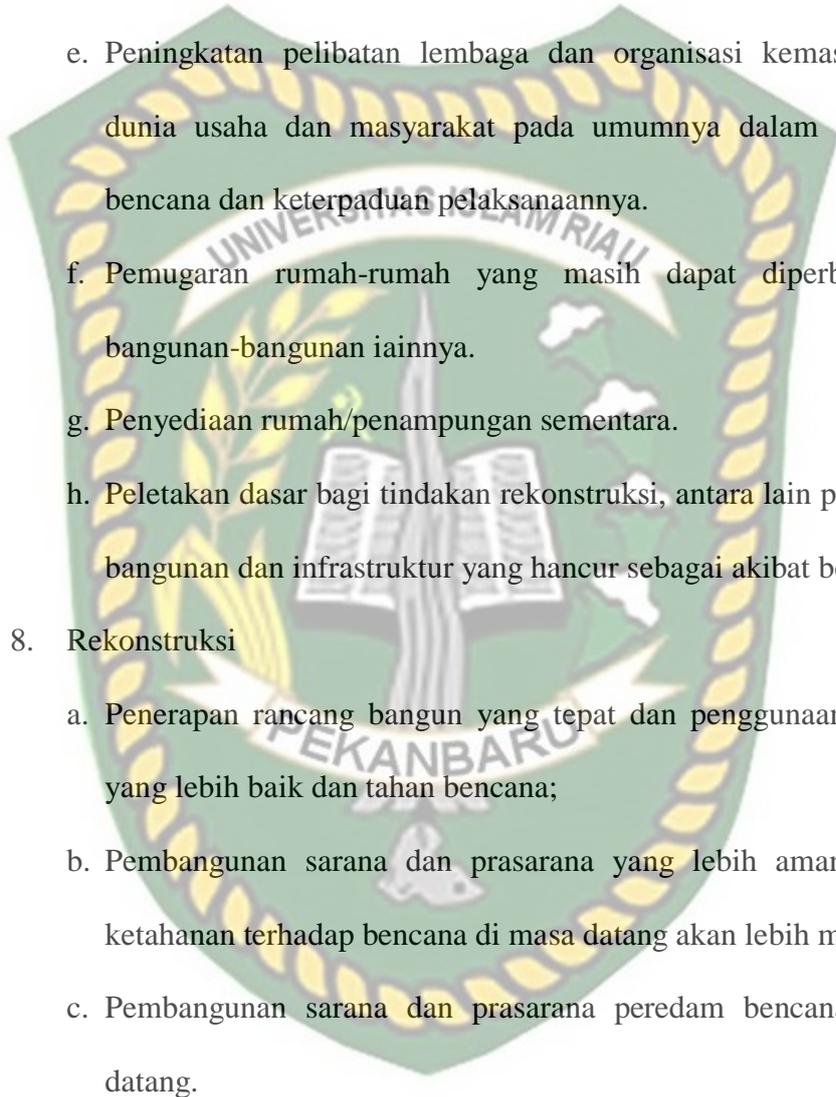
## 4. Tanggap Darurat

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembinaan fungsi satuan Peran pelaksana dalam pengelolaan dan mengkoordinasikan bantuan darurat.

- b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pencarian, penyelamatan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial terhadap korban bencana.
  - c. Peningkatan kemampuan masyarakat dan Peran dalam mengkonsolidasi did segera sesudah terjadi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana darurat agar akibat bencana tidak meluas dan berkepanjangan.
  - d. Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang telah disusun.
  - e. Pengaktifan sistem-sistem penangkal bencana, termasuk diantaranya sistem komunikasi dan informasi bencana.
  - f. Pencarian dan penyelamatan (SAR).
  - g. Penyediaan makanan, tempat penampungan, bantuan medis darurat, dsb..
5. Tindakan-tindakan evakuasi.
  6. Restorasi
    - a. Pembersihan reruntuhan/kotoran agar permukiman serta sarana dan prasarana umum dapat segera digunakan atau difungsikan sebelum direhabilitasi lebih lanjut. Sarana dan prasarana umum tersebut antara lain jalan, lapangan terbang, jalan kereta api, pelabuhan, gedung sekolah, rumah sakit, Puskesmas, kantor pemerintah dan swasta, serta kawasan penting lainnya. Restorasi juga dilakukan

pada pelayanan pokok seperti komunikasi, suplai air bersih dan listrik.

- b. Penyediaan rumah / penampungan sementara sejauh dibutuhkan.
  - c. Pemberian bantuan psiko-sosial untuk menyembuhkan berbagai trauma yang dialami korban serta meningkatkan motivasi untuk segera keluar dari krisis akibat bencana.
  - d. Pemberian bantuan finansial segera kepada para korban untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihannya pada kehidupan normal. Dalam berbagai upaya penanggulangan bencana di luar negeri terbukti bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian korban serta mempercepat kehidupan sosial-ekonomi daerah lokasi bencana.
  - e. Penyusunan program-program pembangunan kembali daerah bencana serta langkah-langkah pembangunan jangka panjang.
7. Rehabilitasi
- a. Perbaikan sarana dan prasarana dasar dan dalam keadaan tertentu dilakukan pemindahan permukiman ke daerah yang lebih aman;
  - b. Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat.
  - c. Peningkatan pelayanan sosial terhadap korban bencana melalui pemberian bantuan dan rehabilitasi permukiman serta sarana umum lainnya seperti tempat ibadah, gedung, sekolah, pasar dan air bersih;

- 
- d. Pasca Bencana dan penyuluhan kepada para korban bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan mereka didukung dengan pemberian sarana usaha ekonomis produktif;
  - e. Peningkatan pelibatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam rehabilitasi bencana dan keterpaduan pelaksanaannya.
  - f. Pemugaran rumah-rumah yang masih dapat diperbaiki serta bangunan-bangunan iainnya.
  - g. Penyediaan rumah/penampungan sementara.
  - h. Peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi, antara lain penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur sebagai akibat bencana.
8. Rekonstruksi
- a. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana yang lebih aman sehingga ketahanan terhadap bencana di masa datang akan lebih meningkat;
  - c. Pembangunan sarana dan prasarana peredam bencana di masa datang.

PROSES Serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan TAGANA adalah :

- a. Kontak:
 

Pertemuan awal, identifikasi dan kejelasan tentang variabel-variabel persepsi, kebutuhan, nilai, kemampuan, harapan, pengalaman, perasaan dan masalah :

1. Variabel ditinjau dari pihak korban.
2. Variabel ditinjau dari pihak lingkungan sosial korban;
3. Variabel ditinjau dari pihak persanel TAGANA.
4. Variabel ditinjau dari pihak yang bekerja sama dengan personel TAGANA di luar lingkungan sosial sasaran;
5. Variabel yang pertama-tama akan ditangani.

Identifikasi dan kejelasan tentang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Jenis kegiatan ditinjau dari pihak korban.
2. Jenis kegiatan ditinjau dari pihak lingkungan sosial korban.
3. Jenis kegiatan ditinjau dari pihak personel TAGANA.
4. Jenis kegiatan ditinjau dari pihak yang bekerja sama dengan personel TAGANA.
5. Jenis kegiatan yang pertama-tama akan ditangani.

Identifikasi tujuan:

1. Tujuan yang diinginkan korban: jangka pendek dan jangka panjang.
2. Tujuan yang diinginkan lingkungan sosial korban.
3. Tujuan sasaran dan lingkungan sosial terhadap upaya personel TAGANA.
4. Tujuan yang diharapkan oleh personel TAGANA sendiri.

Kontrak

1. Penjelasan tentang lingkup penanggulangan bencana.
2. Penjelasan tentang langkah-langkah bersama yang akan dilakukan;

3. Pengembangan komitmen atau kontrak untuk melangkah lebih lanjut yang antara lain mencakup hak-hak, harapan-harapan serta persetujuan bagi personel TAGANA untuk melaksanakan kegiatan.

Eksplorasi dan investigasi:

1. Penelaahan situasi untuk menentukan faktor-faktor utama dalam situasi yang dihadapi korban;
2. Penentuan faktor-faktor signifikan yang menyebabkan berlangsungnya keadaan yang dialami oleh korban.
3. Penentuan faktor-faktor yang paling kritis, pemahaman antar hubungannya dan pemilihan faktor yang dapat ditangani.
4. Penentuan sumber, peluang, kekuatan dan motivasi yang tersedia;
5. Motivasi (pendayagunaan rasa ketidakenakan dan harapan, terutama dari pihak korban).
6. Kemampuan lingkungan sosial untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan rencana tindak sebagai pedoman bersama untuk mengadakan intervensi:

1. Pertimbangan dan penentuan tujuan yang layak;
2. Penentuan jenis jenis kegiatan yang tepat;
3. Penentuan fokus penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan;
4. Penentuan peranan personel TAGANA;
5. Penentuan kekuatan-kekuatan di dalam dan di luar diri korban yang dapat mendukung atau menghambat rencana intervensi;

6. Penentuan waktu untuk melaksanakan rencana
7. Pelaksanaan Rencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
8. Spesifik dalam intervensi maupun dalam penugasan kepada korban,
9. lingkungan sosial maupun tenaga-tenaga pelaksana terkait.
10. Sumber, peluang dan pelayanan yang akan didayagunakan.
11. Metode dan teknik yang dipilih.
12. Siapa mengerjakan apa dan kapan.

Pengendalian, yang mencakup kegiatan

1. Pemantauan atau monitoring, yaitu kegiatan mengamati berlangsungnya proses dan hasilnya secara terus-menerus.
2. Pencatatan atau recording, yaitu kegiatan mencatat proses dan hasil pemantauan.
3. Penilaian atau evaluasi, yaitu kegiatan untuk menilai pelaksanaan proses atau hasil yang dicapai, faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi.
4. Pelaporan, yaitu kegiatan untuk melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan atau kelanjutan program.

Terminasi

Terminasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Meningkatnya kemampuan korban untuk mandiri sehingga intensitas bantuan dikurangi tanpa menutup kemungkinan dibukanya kembali jalur hubungan sekiranya korban membutuhkan bantuan lanjutan atau pengembangan di waktu-waktu yang akan datang.
2. Hasil evaluasi bersama korban, lingkungan sosial dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai hasil-hasil yang dicapai dan proses yang telah dilalui.

#### Bimbingan Lanjut

1. Bimbingan lanjut pada umumnya merupakan tahap yang kurang memperoleh perhatian, padahal tahap ini sangat menentukan kelangsungan hasil-hasil yang telah dicapai serta energi dan waktu yang telah digunakan selama proses penanggulangan bencana berlangsung;
2. Dalam pembinaan lanjut perlu dipelihara dan dikembangkan hasil yang dicapai terutama melalui peningkatan kemampuan-kemampuan korban dan lingkungan sosialnya dengan dukungan pihak-pihak lain yang terkait.

TAGANA membutuhkan peningkatan kinerja agar tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan kompetensi, motivasi dan peranan yang memadai. Peningkatan kinerja dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Selain itu peningkatan kinerja juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai dan sesuai dengan

perkembangan teknologi penanggulangan bencana. Dari sisi organisasi, tujuan peningkatan kinerja TAGANA adalah:

1. Semakin meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi, jangkauan dan profesionalitas kegiatan organisasi.
  2. Semakin besarnya peranan organisasi dalam penanggulangan bencana.
  3. Semakin besarnya tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat internasional, terhadap peranan organisasi dalam penanggulangan bencana.
  4. Meningkatnya kemampuan organisasi untuk menjamin bahwa kegiatannya sesuai dengan kebutuhan sasaran, diberikan dengan tepat dan cepat serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan organisasi lain.
- Dari sisi sasaran kegiatan organisasi.

Tujuan peningkatan kinerja TAGANA adalah:

1. Terjaminnya kualitas dan kontinuitas kegiatan yang diterima oleh sasaran sesuai dengan kebutuhannya.
2. Terpecahkannya hambatan aksesibilitas sasaran yang disebabkan oleh persyaratan dan peraturan.
3. Meningkatnya responsivitas organisasi terhadap berbagai kebutuhan dan masalah yang berkembang di dalam masyarakat.

Keberhasilan TAGANA dinilai dari indikator sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kesatuan masyarakat atau komunitas yang secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.

2. Meningkatnya jumlah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang mengalokasikan APBD untuk kegiatan penanggulangan bencana, termasuk untuk kegiatan operasional TAGANA.
3. Adanya kemampuan TAGANA dalam memenuhi kebutuhannya akan anggaran serta personel, fasilitas, dan peralatan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya.
4. Besarnya frekuensi dan keberhasilan keterlibatan TAGANA dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, baik pada saat, sebelum, maupun sesudah bencana, di daerah kerja masing-masing maupun di luar daerah kerjanya.
5. Kemampuan TAGANA dalam memberikan masukan guna peningkatan kinerja SATLAK PBP dan SATKORLAK PBP serta instansi dan organisasi penanggulangan bencana lainnya.
6. Kemampuan TAGANA dalam mengembangkan program dan kegiatannya dalam kaitan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.

Hakekat penanggulangan bencana adalah keberlanjutan dan pengembangan upaya. Sebagai suatu organisasi, TAGANA akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara berlanjut, termasuk mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi aktual setempat.

Diharapkan agar dalam waktu-waktu mendatang keberadaan TAGANA benar-benar disikapi dan ditindaki secara serius oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan

pengembangan serta penyediaan anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai. Pada gilirannya, masyarakatlah yang akan menarik manfaat dengan keberadaan TAGANA.

Taruna Siaga Bencana selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Provinsi Riau dengan luas wilayah 87.023,66 km<sup>2</sup> Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Hutan yang sering menimbulkan kebakaran tak saja asapnya mengganggu kesehatan, tetapi juga trauma akan musibah dilingkungan tersebut

Dalam melaksanakan Perannya, FK Taruna Siaga Bencana Alam Provinsi Riau mempunyai Peran berdasarkan SK. Kepala Dinas Provinsi Riau No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau

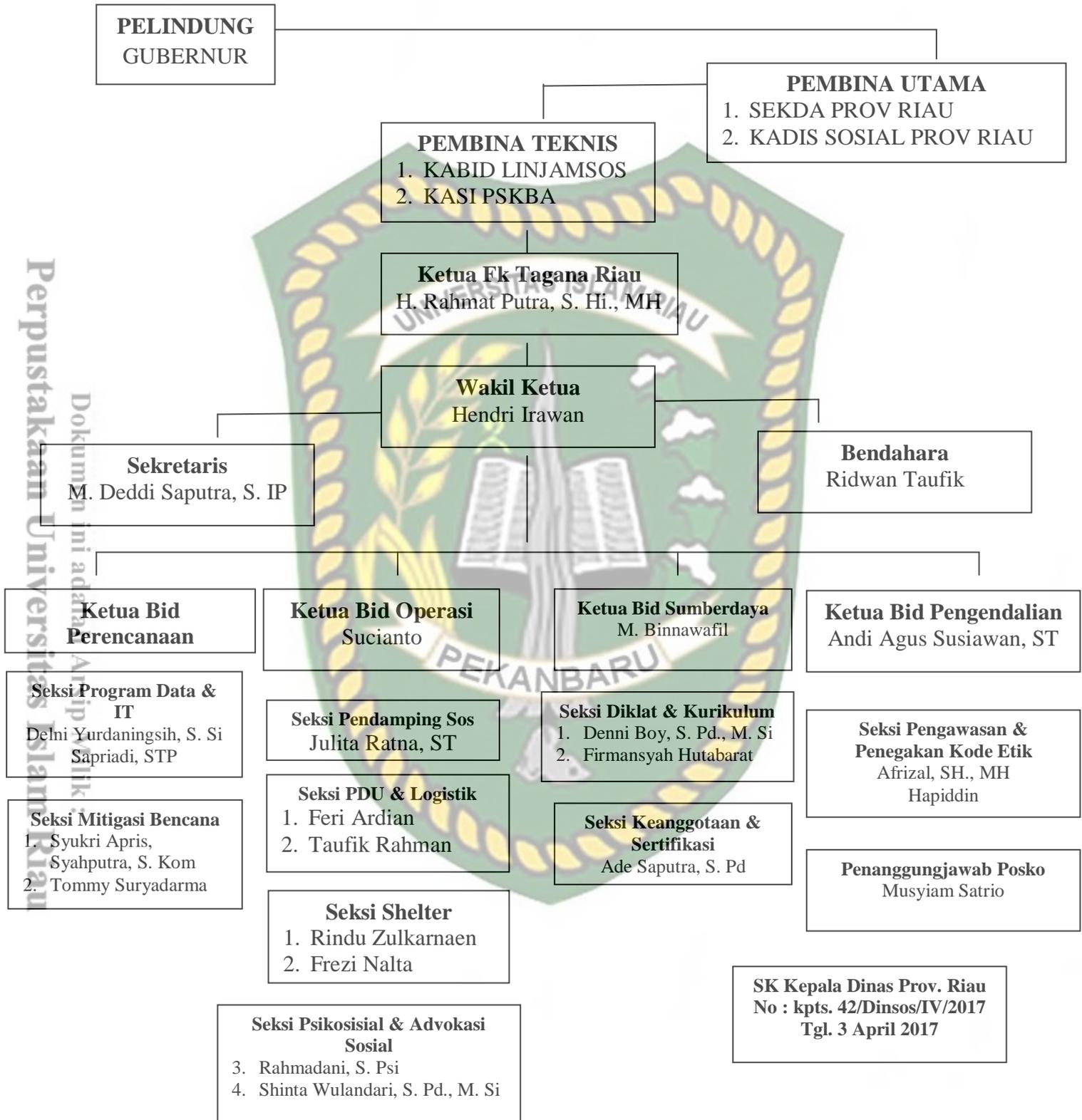
Nomor KPTS. 36/DINSOS/III/2016 Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (FK-TAGANA) Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan Perannya, FK TAGANA Provinsi Riau mempunyai Bagan Struktur sebagai berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Gambar I. 2 Struktur Pengurus FK TAGANA Provinsi Riau Periode 2017-2019

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

#### 4.7 Pembahasan Penelitian tentang Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi

##### 1. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Drs. H. Dahrius Husin, MM selaku Kepala dinas Sosial Propinsi Riau
2. Drs. Umar, HM Selaku Kabid Linjamsos
3. Fety Nurhidayati, S. Psi selaku Kasi PSKBA
4. Tri Agus, SE., M. Si selaku Staf Seksi PSKBA
5. Hendri Irawan selaku Anggota Tagana
6. Ade Hermawan selaku Anggota Tagana
7. Andi Rahmat selaku Tokoh Masyarakat.
8. Dedesweni selaku Tokoh Masyarakat
9. Fenty Rahmadhani Tokoh Masyarakat

##### 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah dijalani oleh Informan, pendidikan formal dapat berpengaruh terhadap pengetahuan umum atau pengetahuan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga berpengaruh terhadap cara dan waktu dalam memenuhi tanggung jawab. Pada era zaman sekarang pendidikan sangat penting seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah wajib belajar 9 tahun, serta melanjutkan ketingkat selanjutnya hinga keperguruan tinggi (bangku kuliah). Pendidikan juga dapat

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dan merupakan salah satu factor yang ikut mempengaruhi kemampuan Pemerintahan dalam menjalankan Peran dan fungsinya yang diberikan dan menerapkannya dalam pekerjaan dan dalam hubungan kerja sesama dalam menjalankan Pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, maka terlihat tingkat pendidikan Informan dari TAGANA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 2 : Tingkat Pendidikan Perangkat Pemerintahan FK TAGANA**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SLTA	2	50%
4	Sarjana	2	50%
	Jumlah	5	100%

Sumber : *Penelitian Lapangan, 2019*

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan dari Pemerintah dari FK TAGANA terutama berpendidikan SLTA 2 orang dan berpendidikan sarjana 2 Orang. Pendidikan seseorang akan menunjang kredibilitas dalam bekerja dan pengetahuan orang tersebut. Selanjutnya tingkat pendidikan dari Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilihat pada tabel V.2 sebagai berikut :

**Tabel IV.3 : Tingkat Pendidikan Kelompok Jabatan Fungsional**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SLTA	2
4	Sarjana	1
	Jumlah	3

Sumber : *Penelitian Lapangan, 2019*

**Tabel IV. 4 : Tingkat Pendidikan Anggota TAGANA**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	2
3	SLTA	3
4	Sarjana	-
	Jumlah	5

*Sumber penelitian lapangan, 2019*

**Tabel IV. 5 : Tingkat pendidikan Tokoh Masyarakat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	1
3	SLTA	4
4	Sarjana	-
	Jumlah	5

*Sumber : penelitian lapangan, 2019*

### 3. Tingkat Usia Responden

Usia dapat menjadi ukuran kematangan dan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Selain memerlukan orang yang lebih berpengalaman, didalam menjalankan pemerintahan juga diperlukan perangkat pemerintah yang mengisi struktural pada FK TAGANA yang berumur muda yang mempunyai kempuan fisik dalam mengerjakan Peran-Perannya. Dapat dilihat pada tabel tingkat umur perangkat pemerintahan desa sebagai berikut :

Adapun tingkat umur dilihat dari FK TAGANA yang menjadi sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 6 : Tingkat Umur Responden FK TAGANA**

No	Umur	Pekanbaru			Jumlah
1	25-30	2		1	3
2	31-35	-		2	2
3	36-40	3		1	4
4	41-45	-		2	2
5	46-50	1		2	3
6	50 keatas	1		1	2

Sumber : *Penelitian Data Olahan 2019*

#### 4. HASIL PENELITIAN

Pemerintahan adalah badan yang menyelenggarakan Peran-Peran umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendelegasian urusan pemerintah ini dilaksanakan berdasarkan azas Peran pembantuan. Peran pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan Peran tersebut.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana, maka hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

### A. Prabencana

Yang dimaksud Prabencana dalam penelitian ini adalah informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun daripada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Melakukan komunikasi formal atau informal kepada anggota merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pengurus (dalam hal ini TAGANA), sehingga adanya upaya Prabencana.

Manfaat Prabencana, dalam upaya komunikasi antara Pengurus dengan anggota TAGANA yang berkoordinasi yaitu agar pendapat satu sama lain diterima oleh masing-masing pihak. Untuk itu komunikasi sangat penting dalam menjalin hubungan kerja. Baik komunikasi yang dilakukan di dalam jam kerja seperti di kantor atau komunikasi yang dilakukan diluar jam kerja atau kita sebut dengan komunikasi informal.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Dinas Provinsi Riau pada tanggal 21 Mei 2019, dengan pertanyaan :

Apakah adanya Prabencana ataupun Komunikasi yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana terutama Prabencana ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“Komunikasi itu penting. Dan yang namanya pertemuan atau rapat koordinasi pasti bakal melakukan komunikasi. Sebagai*

*langkah awal untuk pembinaan mengenai pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Tagana yang ada di provinsi Riau sehingga penanggulangan Bencana bisa sesegera mungkin terlaksana dengan baik, komunikasi yang terjalin cukup baik dan komunikasi terjadi untuk perintah tetap menuunggu perintah atasan dan Anggota tidak akan mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Anggota, terkait mengenai dari Anggota jika berkenaan dengan informasi Bencana tidak mesti Pengurus yang mengetahui terlebih dahulu, jika Anggota yang mengetahuinya maka Pengurus juga akan segera menindak lanjuti apa apa yang akan dikerahkan dan yang akan dipersiapkan”, kemudian adanya upaya Prabencana juga di perlukan dalam pelaksanaan Peran Tagana dan itu juga sudah ada yang dilakukan. (Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Kabid Linjamsos, dimana pertanyaannya adalah :

Apakah Komunikasi berupa upaya Prabencana yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi dalam upaya Prabencana antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Umar, HM Selaku Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

*“sejauh ini upaya Prabencana berupa Komunikasi tetap berjalan dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi dengan adanya upaya Prabencana ”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Kasi PSKBA dan Staf, dengan pertanyaan yang sama dimana pertanyaannya adalah :

Apakah Komunikasi berupa Prabencana yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi Prabencana antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana sebelum dan sesudah Prabencana?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi PSKBA dan Staf Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan jawaban yang sama sebagai berikut :

*“sejauh ini Komunikasi dalam Prabencana tetap berjalan dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi, Prabencana tetap dilakukan dalam pelaksanaan Peran terutama dalam hal kerja internal dan dalam penanganan bencana”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Prabencana dalam hal Komunikasi yang dilakukan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Hendri Irawan selaku Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Apakah Prabencana yang dilakukan oleh Pengurus Tagana dalam pelaksanaan Peran dilaksanakan berupa Komunikasi yang

terjalin antar sesama TAGANA yang terjalin dengan baik, dan beruapa apa? dan bagaimana komunikasi Prabencana antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Komunikasi Prabencana Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Riau sangat Intensif dan berjalan lancar baik dari atasan kepada Anggota maupun dari Anggota kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai anggota tagana tidak adanya kategori anggota Tagana yang aktif dan Tagana yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh pada tali asih ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Prabencana dalam hal Komunikasi penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , masih dengan pertanyaan yang sama :

Apakah Prabencana yang dilakukan dalam pembinaan tagana ? selanjutnya apakah Komunikasi yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Prabencana dalam pembinaan terhadap anggota Tagana dilakukan dan itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan Peran oleh Tagana dalam melaksanakan*

*penanggulangan bencana sehingga Komunikasi berjalan baik dan lancar terkait kendala dalam menjalankan Peran tidak ada semua berjalan lancar” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Dinas dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan Tokoh Masyarakat terkait hal Komunikasi, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Prabencana berupa Komunikasi yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“Sejauh ini Prabencana dalam pelatihan anggota tagana sudah cukup membantu dari pada Peran tagana kepada kami sebagai tokoh masyarakat yang pernah menerima bantuan dari pihak tagana, untuk Tagana sudah sangat membantu dalam hal penanggulangan Bencana, namun disini juga terkendala terkadang tidak tepat waktu tapi menurut pandangan kami sudah lumayan membantu ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Dinas dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan Desweni selaku Tokoh Masyarakat terkait hal Komunikasi,

dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Prabencana dalam pelatihan pembinaan berupaya melakukan Komunikasi yang terjalin antar sesama TAGANA terjalin dengan baik ? dan bagaimana komunikasi antara Pengurus dengan Anggota dan antara Anggota dengan Anggota ? dan apa yang menjadi kendala dalam menjalankan Peran Tagana ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“Tagana Sangat membantu dalam Penanggulangan Bencana Alam ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Prabencana dalam pembinaan anggota Tagana dalam melaksanakan Perannya menanggulangi korban bencana sejauh ini berupaya melakukan Komunikasi dan dinilai masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya komunikasi yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari TAGANA dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau tersebut, **penulis menganalisa** bahwa Peran Taruna Siaga Bencana

Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau sudah **cukup baik**.

## B. Bencana

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Bencana , adapun hasil wawancara

Yang dimaksud Bencana dalam penelitian ini adalah penggunaan Bencana manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi melalui pendidikan dan latihan.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Drs. H. Dahrius Husin, MM Kepala Dinas Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana pendidikan dan latihan yang dilakukan dalam pembinaan Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana, maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“pendidikan dan latihan Bencana yang tersedia khususnya Tagana Provinsi Riau Sudah sangat layak dan bisa dikatakan layak karna umumnya sudah sarjana semua, terkait peningkatan dan perubahan antara sebelum di adakan pembinaan pelatihan terkait Tagana maka belum sepenuhnya bisa dikatan optimal, oleh sebab itu pendidikan dan latihan yang dilakukan cukup membantu Tagana dalam melaksanakan Perannya” (Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Kabid Linjamsos , dimana pertanyaannya adalah :

Bagaimana Kualitasn pendidikan dan latihan terhadap Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana, maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi PSKBA Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“sejauh ini berkaitan dengan pendidikan dan latihan Bencana sudah cukup mendukung dan terbukti juga dengan Komunikasi tetap berjalan dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi”*(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).

Selanjutnya Bapak Staf Seksi PSKBA PSKBA Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“sejauh ini berkaitan dengan pendidikan dan latihan Bencana sudah cukup mendukung dan terbukti juga dengan Komunikasi tetap berjalan dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi”*(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Komunikasi penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Bapak Hendri Irawan selaku Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pendidikan dan latihan Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana, maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“pendidikan dan latihan Bencana yang ada cukup membantu baik segi komunikasi berbasis Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Riau sangat Intensif dan berjalan lancar baik dari atasan kepada Anggota maupun dari Anggota kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai anggota tagana tidak adanya kategori anggota Tagana yang aktif dan Tagana yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh pada tali asih terkait peningkatan dari yang sebelum diadakan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan maka masih sangat jauh harus lebih diperhatikan karena kendala Bencana akan berpengaruh juga kepada pembawaan dan kebiasaan saat melakukan komunikasi ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih dengan Bapak Hermawan selaku Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pendidikan dan latihan Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana,

maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“pendidikan dan latihan untuk Bencana yang ada sudah cukup memadai tentunya sebelum dan sesudah pelatihan pasti ada perubahan berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan dan pendidikan dan latihan itu merupakan hal yang sangat dominan untuk terus dilakukan dalam peningkatan kualitas dan kemampuan Tagana” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Dinas dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan beberapa Tokoh Masyarakat terkait hal Bencana , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Pendidikan dan latihan Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana, maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“Pendidikan dan Latihan untuk Struktur Tagana menurut pandangan kami juga tidak terlalu memperhatikan tetapi dalam kualitas Bencana kami memang sudah terbantu meskipun belum secara optimal” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih dengan Tokoh Masyarakat terkait hal Bencana , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Pendidikan dan latihan Bencana yang ada dalam Struktural TAGANA? jika dikaitkan dengan proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Bencana yang ada di Tagana, maka bagaimana dampak setelah pembinaan dan setelah diadakan pembinaan ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“pendidikan dan pelatihan Bencana yang ada pada Tagana sudah memadai meskipun belum secara optimal proses pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas tagana juga sudah dilakukan tentunya sangat berbeda dari sebelum dibina sampai kepada setelah dibina” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Pendidikan dan Pelatihan Bencana masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya komunikasi yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari TAGANA dapat terlaksana dengan baik, terkait dengan Bencana memang sudah banyak yang Sarjana namun memang belum semuanya oleh sebab itu memang belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan Bapak hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial

Provinsi Riau tersebut, **penulis menganalisa** bahwa Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau sudah **cukup baik**.

### C. Pasca Bencana

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Disposisi/ Sikap, adapun hasil wawancara

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Dinas Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019, dengan pertanyaan :

Apakah ada Pasca Bencana dilakukan ? Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“Pasca Bencana terhadap anggota Tagana Sudah dilakukan, sebagai upaya Prabencana, pelatihan maka pemberian bimbingan secara berkala lah yang bisa memandu daripada anggota Tagana, Disposisi/ Sikap yang bagaimana yang dilakukan Dinas Provinsi Riau terkait Peningkatan kualitas SDM dalam menanggulangi Bencana Alam, maka Disposisi/ Sikap memang sudah ditunjukkan secara langsung saat berkeperluan maka Disposisi masih belum optimal.*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kabid Linjamsos Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“sejauh ini berkaitan dengan Disposisi/Sikap sudah cukup mendukung dan terbukti juga dengan Komunikasi tetap berjalan*

*dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kasi PSKBA Dinas Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

“ Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Disposisi/ Sikap berupa Pasca Bencana yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi PSKBA Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“ bentuk Disposisi atau pemberian bimbingan yang dilakukan adalah tindak lanjut dari informasi yang ada masuk ke bagian umum dan langsung untuk ditindak lanjuti.*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Staf Seksi PSKBA pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“sejauh ini berkaitan dengan pemberian bimbignan Disposisi/Sikap sudah cukup mendukung dan terbukti juga dengan Komunikasi tetap berjalan dengan baik dari atasan kepada Anggota dan juga ada dari Anggota kepada atasan tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada Anggota. kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk terjadi”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Disposisi/ Sikap penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota TAGANA pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Pasca Bencana baik dilapangan dalam penanggulangan bencana maupun urusan internal. Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Bencana , berpengaruh ke Komunikasi dan komunikasi juga dan komunikasi juga nantinya akan berengaruh kepada Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan yang di kategorikan ada cukup membantu baik segi komunikasi berbasis Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Riau sangat Intensif dan berjalan lancar baik dari atasan kepada Anggota maupun dari Anggota kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai anggota tagana tidak adanya kategori anggota Tagana yang aktif dan Tagana yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh pada tali asih terkait peningkatan dari yang sebelum diadakan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan maka masih sangat jauh harus lebih diperhatikan karena kendala Bencana akan berpengaruh juga kepada pembawaan dan kebiasaan saat melakukan komunikasi, terkait disposisi tetap dilakukan meskipun hanya melalui supervisi dan pengawasan tidak langsung dan hasilnya Cukup” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Disposisi/ Sikap penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Pasca Bencana berupa struktur internal dalam hal Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Bencana , berpengaruh ke Komunikasi dan komunikasi juga dan komunikasi juga nantinya akan berengaruh kepada Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan yang di kategorikan ada cukup membantu baik segi komunikasi berbasis Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Riau sangat Intensif dan berjalan lancar baik dari atasan kepada Anggota maupun dari Anggota kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai anggota tagana tidak adanya kategori anggota Tagana yang aktif dan Tagana yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh pada tali asih terkait peningkatan dari yang sebelum diadakan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan maka masih sangat jauh harus lebih diperhatikan karena kendala Bencana akan berpengaruh juga kepada pembawaan dan kebiasaan saat melakukan komunikasi, terkait disposisi tetap dilakukan meskipun hanya melalui supervisi dan pengawasan tidak langsung dan hasilnya Cukup” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Dinas dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan Bapak Andi Rahmat selaku Tokoh Masyarakat terkait hal Disposisi/ Sikap, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Pasca Bencana dalam Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“Struktur Tagana menurut pandangan kami juga tidak terlalu memperhatikan tetapi dalam kwalitas Bencana kami memang sudah terbantu meskipun belum secara optimal karna ini juga akan*

*dipengaruhi dalam rangka Disposisi dan Sikap” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Wawancara kembali dengan Tokoh Masyarakat terkait hal Disposisi/ Sikap, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“dalam menanggapi bencana alam maka pandangan Kami TAGANA suda sangat membantu meskipun bantuan itu terkadang agak terlambat dan mungkin berkaitan dengan akses untuk penyaluran bantuan atau pihak penyumbang bantuan.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Disposisi/Sikap masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya komunikasi yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari TAGANA dapat terlaksana dengan baik, terkait dengan Bencana memang sudah banyak yang Sarjana namun memang belum semuanya oleh sebab itu memang belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan Bapak hasil wawancara tersebut, **penulis**

**menganalisa** bahwa Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau sudah **cukup baik**.

#### D. Struktur Birokrasi

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Struktur Birokrasi, adapun hasil wawancara

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Dinas Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada FK TAGANA dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi, Bencana , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“Untuk Penempatan Stuktur Birokrasi pada Dinas Sosial Provinsi Riau baik dari segi Komunikasi , Bencana yang ada dan disposisi maka penempatan sudah diadakan pertimbangan yang matang dan penempatannya sudah disesuaikan dengan bidang masing-masing untuk FK TAGANA karena delegasi Peran dari Dinas Sosial maka Penempatan FK TAGANA juga sudah sesuai.*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Linjamsos Dinas Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“untuk penempatan Struktur Birokrasi sudah sesuai menurut pandangan saya berkaitan dengan pelaksanaan Peran memang ada yang lalai namun tidak semuanya”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Berikut hasil wawancara yang diperoleh Kasi PSKBA Dinas Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada FK TAGANA dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi, Bencana , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya ?

Sebagaimana yang dikatakan Kasi PSKBA Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“Penempatan Struktur masih kurang karena ini masih ada yang tidak tau dengan Peran dan fungsinya, saya sebagai kasi PSBK Dinas Sosial Provinsi Riau terkadang masih ada anggota-anggota yang belum tau akan kewajibannya tetapi hanya tau haknya saja .*

Sebagaimana yang dikatakan Staf Seksi PSKBA pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“berkaitan dengan penempatan struktur sudah pas namun disini kesadaran dari anggota yang tidak ada bisa jadi juga karena bukan ASN”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Struktur Birokrasi penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota TAGANA pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada FK TAGANA dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi, Bencana , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“penempatan struktur sudah cukup bagus dan pelaksanaan Peran juga sudah baik” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Struktur Birokrasi penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota Tagana pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada FK TAGANA dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi, Bencana , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya ?

Adapun jawaban dari Anggota Tagana yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

*“ Struktur Birokrasi , berpengaruh ke Komunikasi dan komunikasi juga dan komunikasi juga nantinya akan berengaruh kepada Disposisi/ Sikap yang ditunjukan yang di kategorikan ada cukup membantu baik segi komunikasi berbasis Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Riau sangat Intensif dan berjalan lancar baik dari atasan kepada Anggota maupun dari Anggota kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai anggota tagana tidak adanya kategori anggota Tagana yang aktif dan Tagana yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh pada tali asih terkait peningkatan dari yang sebelum diadakan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan maka masih sangat jauh harus lebih diperhatikan karena kendala Bencana akan berpengaruh juga kepada pembawaan dan kebiasaan saat melakukan komunikasi, terkait disposisi tetap dilakukan meskipun hanya melalui supervisi dan pengawasan tidak langsung dan hasilnya Cukup” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Dinas dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan Tokoh Masyarakat terkait hal Disposisi/ Sikap, dimana penulis

melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada FK TAGANA dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi, Bencana , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“Struktur Tagana menurut pandangan kami juga tidak terlalu memperhatikan tetapi dalam kualitas Bencana kami memang sudah terbantu meskipun belum secara optimal karna ini juga akan dipengaruhi dalam rangka Disposisi dan Sikap” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Wawancara kembali dengan Tokoh Masyarakat terkait hal Struktur Birokrasi, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Disposisi/ Sikap yang ditunjukkan saat terjadi Bencana Alam ? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bisa penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“dalam menanggapi bencana alam maka pandangan Kami TAGANA suda sangat membantu meskipun bantuan itu terkadang agak terlambat dan mungkin berkaitan dengan akses untuk penyaluran bantuan atau pihak penyumbang bantuan.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Struktur Birokrasi masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya komunikasi yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari TAGANA dapat terlaksana dengan baik, terkait dengan Bencana memang sudah banyak yang Sarjana namun memang belum semuanya oleh sebab itu memang belum optimal. Berkaitan dengan penempatan struktur Birokrasi belum memandang kualitas dari masing-masing anggota sebab masih terdapat anggota yang belum tau Peran dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan Bapak hasil wawancara tersebut, **penulis menganalisa** bahwa Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau sudah **cukup baik**.

#### **4.8 Hambatan Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau**

Adapun sejumlah hambatan yang ditemui penulis dilapanga berdasarkan pengamatan serta wawancara kepada Dinas dan Struktur TAGANA serta Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Mei 2019 yaitu :

1. Keterbatasan Pengetahuan FK TAGANA dalam menjalankan Peran dan Fungsi ini berkaitan dengan Bencana manusia yang ada pada FK

TAGANA, dan itu terlihat saat menjalankan tugas dan Belum sesuai dengan apa yang di bina dan yang dilakukan setelah pembinaan.

2. Pelaksanaan Tugas yang lamban dan kurang tepat pada waktunya ini berkaitan dengan tali asih dimana penerimaan tali asih yang masih kurang diperhatikan.
3. Tidak adanya beda antara PePeran TAGANA yang aktif dan yang tidak aktif, bahwa belum adanya standar yang aktif itu seperti apa, dimana anggota TAGANA tidak ada perbedaan dalam penerimaan tali asih (disama ratakan) baik yang melaksanakan tugasnya secara rutin maupun yang tidak ada bekerja sama sekali.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dapat disimpulkan berdasarkan 2 tujuan penelitian yaitu :

1. Sesuai Peran Taruna Siaga Bencana Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Riau dengan 3 indikator : yaitu sesuai dengan Teori Santoso yang mana Point Pertama yaitu Pemberian Petunjuk, berdasarkan wawancara lapangan, observasi serta penulis sendiri menyimpulkan bahwa indikator Pemberian Petunjuk berada pada kategori Cukup Optimal dalam pelaksanaan Perannya, untuk indikator Pemberian Pendidikan dan Latihan juga penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi maka bisa dikatakan Sudah Cukup Baik meskipun belum bisa dikatakan maksimal. selanjutnya untuk Pemberian Bimbingan Disposisi/sikap yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Peran tagana membantu pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana Alam maka penulis juga menyimpulkan Sudah Cukup Baik meskipun masih terdapat disposisi atau sikap yang belum maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi, keterbatasan Pengetahuan FK TAGANA dalam menjalankan terkait Peran dan fungsinya, sehingga Pemberian

Petunjuk, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberian Bimbingan untuk Disposisi dan Birokrasi masih mengalami hambatan-hambatan meskipun tidak terlalu fatal namun ini menjadi hal yang perlu diperhatikan baik dalam melakukan komunikasi, Disposisi, baik penempatan sumberdaya, dan Birokrasi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Dinas Sosial lebih memberikan rincian Peran yang jelas baik dalam bentuk peraturan dan juklak serta juknis yang jelas sehingga FK TAGANA bisa lebih efektif dalam menjalankan Peran dan Fungsinya.
2. Berkaitan dengan Tali Asih meskipun sifatnya sosial hendaknya Tali Asih untuk FK TAGANA lebih diperhatikan.
3. Dalam menjalankan Perannya hendaknya anggota tagana tidak pilih-pilih Peran yang akan dilaksanakan.
4. Lebih meningkatkan Pelatihan dalam menumbuhkan sikap dan rasa sosial sehingga Peran yang dilaksanakan bisa dijalankan dengan baik lancar tanpa kendala, serta program-program FK TAGANA tersusun dengan baik.